

SKRIPSI

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*) DALAM TRANSAKSI PERBANKAN



**OLEH
RAIHAN DIRHAM
B111 11 162**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

HALAMAN JUDUL

**TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY
LAUNDERING*) DALAM TRANSAKSI PERBANKAN**

OLEH:

RAIHAN DIRHAM

B111 11 162

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2015

PENGESAHAN SKRIPSI

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*) DALAM TRANSAKSI PERBANKAN

Disusun dan diajukan oleh

RAIHAN DIRHAM

B111 11 162

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Kamis, 3 September 2015
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Prof.Dr. Andi Sofyan, S.H, M.H

NIP. 19620105 198601 1 001

Sekretaris

Dr. Amir Ilvas, S.H, M.H

NIP.19800710 200604 1 001

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.

NIP. 1961 0607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : RAIHAN DIRHAM
Nomor Induk : B 111 11 162
Bagian : Hukum Pidana
Judul : TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*) DALAM TRANSAKSI PERBANKAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, Mei 2015

Pembimbing I


Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H, M.H
NIP. 19620105 198601 1 001

Pembimbing II


Dr. Amir Ilyas, S.H, M.H
NIP.19800710 200604 1 001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : **RAIHAN DIRHAM**
Nomor Induk : B 111 11 162
Bagian : Hukum Pidana
Judul : TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*) DALAM TRANSAKSI PERBANKAN

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, Agustus 2015

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 1961 0607 198601 1003

ABSTRAK

RAIHAN DIRHAM (B 111 11 162), dengan Judul **“Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Perbankan (Studi Kasus Putusan No.447/Pid.B/2008/PN.Krw)”**. Dibawah bimbingan Bapak **Andi Sofyan**, Selaku Pembimbing I dan Bapak **Amir Ilyas**, Selaku Pembimbing II.

Tinjauan penelitian ini untuk mengetahui penerapan hukum materil terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Perbankan (Studi Kasus Putusan No. 447/Pid.B/2008/PN.Krw) dan Peranan Bank Indonesia (BI) selaku Bank Central dalam pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penelitian ini dilakukan di Kota Jakarta dan Kota Makassar yaitu dengan mewawancarai beberapa ahli dibidangnya. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung terhadap para seperti Staff ahli PPATK, Salah satu Dosen/Akademisi Dr.Yenti Garnasih.,S.H.,M.H, dan Staff Bank Indonesia (BI).

Data Sekunder diperoleh melalui beberapa literature , beberapa buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, dan karya tulis ilmiah lainnya. Data primer dan sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif oleh penulis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dalam penerapan hukum materil terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Perbankan sangat kompleks dan banyak keunggulan dalam memberantas dan mencegah tindak pidana pencucian uang walaupun ada beberapa bagian yang perlu dikoreksi dan tambahkan, dalam putusan No. 447/Pid.B/2008/PN.Krw hakim telah memutus dengan benar kepada terdakwa. (2)Sejak 2011 setelah lahirnya UU OJK Fungsi Pengawasan BI telah berpindah ke OJK. Sehingga OJK memiliki peran yang strategis sebagai pengawas dibidang perbankan termasuk terhadap tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan terlihat jelas pada UU OJK pasal 7.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang senantiasa membimbing langkah penulis agar mampu merampungkan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Segenap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaannya, penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran kritik konstruktif senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, kepada ayahanda Dirham Isfhani dan Ibunda **Dr. Oky Deviany Burhamzah, S.H, M.H.**, yang senantiasa merawat, medidik dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Kepada saudara sekaligus kakak penulis **Mario Dirham, S.E.**, setiap saat mengisi hari-hari penulis dengan penuh kebersamaan, canda dan tawa.

Terima kasih penulis haturkan pula kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Seluruh dosen di Fakultas Hukum UNHAS yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Andi Sofian, S.H, M.H selaku pembimbing I, ditengah kesibukan dan aktivitasnya senantiasa bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H, M.H selaku pembimbing II yang senantiasa menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dewan penguji Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H, M.H., Bapak Prof. Dr. Muhammad Syukri,S.H, M.H., dan Bapak H.M Imran Arief, S.H, M.H., atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini;
6. Seluruh pegawai dan karyawan di Fakultas Hukum UNHAS yang senantiasa membantu penulis selama menempu pendidikan;

7. Adinda Andi Nurannisa Meilany yang selama ini tanpa lelah memberi semangat dan dukungan terhadap segala hal termasuk dalam melakukan penulisan skripsi ini hingga selesai.
8. Keluarga Besar Pencinta Alam Recht Faculteit (CAREFA) yang memberikan berbagai ilmu dan pengalaman sangat berharga yang tidak didapatkan di dalam ruangan kelas perkuliahan.
9. Sahabat-Sahabat seperjuangan MEDIASI Fakultas Hukum UNHAS yang selalu membantu dalam berbagai hal kepada penulis
10. Semua pihak yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tidak bias sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya. Akhir kata, semoga tulisan ini (skripsi) dapat bermanfaat kepada kita semua, terutama dalam menambah khasana perkembangan hukum di Indonesia, Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 01 September 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 7
A. Tindak Pidana Ekonomi.....	7
1. Pengertian Hukum Pidana.....	7
2. Pengertian Tindak Pidana	8
3. Pengertian Tindak Pidana Umum & Tindak Pidana Khusus ...	8
4. Tindak Pidana Ekonomi.....	9
B. Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	11
1. Sejarah dan Perkembangan Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	11
2. Pengertian Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	13
3. Tahap-Tahap & Proses Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	15
4. Metode Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	17
5. Kriminalisasi Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>).....	19
6. Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Umum	20
7. Dampak Kejahatan Pencucian Uang.....	21
8. Rezim Anti-Pencucian Uang.....	23
9. Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang	27
10. Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Pencucian Uang	33
C. Perbankan.....	35
1. Pengertian Hukum Perbankan	35
2. Pengertian Tindak Pidana Perbankan	37
3. Tindak Pidana di bidang Perbankan	37

4. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Perbankan.....	38
5. Prinsip Mengenal Nasabah (<i>Know Your Costumer Priciples</i>). ..	42
D. Bank Indonesia.....	44
1. Pengertian Bank Indonesia.....	44
2. Kedudukan Bank Indonesia	45
3. Tujuan Bank Indonesia	46
4. Tugas Bank Indonesia	47
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Jenis dan Sumber data.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
E. Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	53
A. Bagaimana penerapan hukum materill terhadap tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan di Indonesia	53
1. Kriminalisasi Pencucian Uang di Indonesia	53
2. Perkembangan UU TPPU di Indonesia	57
3. PPATK/ FIU (<i>Financial Intelegent Unit</i>) Indonesia.....	63
4. Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>) dalam transaksi perbankan.....	66
5. Study Kasus 447/Pid.B/2008/PN. Krw	68
B. Bagaimana peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Perbankan	77
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cita negara dari Bangsa Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Implikasi dari adanya cita negara adalah penyelenggaraan negara baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, maupun budaya yang diupayakan untuk mewujudkan cita negara tersebut. Untuk mewujudkan cita negara, penyelenggaraan negara haruslah berdasar kepada Pancasila sebagai dasar negara.¹ Pancasila merupakan dasar atau basis filosofi bagi negara dan tertib hukum bangsa Indonesia.² Selain itu, Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warganya karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat.³

Mewujudkan kesejahteraan rakyat berkaitan dengan penegakan hukum dalam suatu negara. Hal tersebut jelas dalam konsepsi negara hukum atau “*Rechtsstaat*” pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Negara Indonesia

¹ Keberadaan Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis tersimpul dalam alinea ke-IV Pembukaan UUD NRI 1945. Dalam Pembukaan UUD NRI 1945 tidak tercantum kata „Pancasila” secara eksplisit namun anak kalimat “...dengan berdasarkan kepada...” Ini memiliki makna dasar negara adalah Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis sebagaimana ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar negara Indonesia itu disebut dengan istilah „Pancasila”. (sebagaimana dijelaskan Khaelan dalam Negara Kebangsaan Pancasila-Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya, Yogyakarta: Paradigma, 2013, hlm. 49.

² Khaelan, Negara Kebangsaan Pancasila-Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya, Yogyakarta: Paradigma, 2013, hlm. 50.

³ Ibid, hlm. 50.

adalah Negara hukum”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘rechtsstaat’ itu mencakup empat elemen penting yaitu (1) Perlindungan hak asasi manusia; (2) Pembagian kekuasaan; (3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan (4) Peradilan tata usaha Negara. Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu: 1. *Supremacy of Law*; 2. *Equality before the law*; dan 3. *Due Process of Law*. Keempat prinsip ‘rechtsstaat’ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip ‘*Rule of Law*’ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang.⁴

Implikasi Indonesia sebagai negara hukum ialah dengan menegakkan hukum itu sendiri, salah satunya ialah hukum pidana. Hukum pidana oleh banyak ahli dikatakan sebagai hukum publik. Yang dimaksudkan sebagai hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat/pemerintah. Maka dari itu hukum pidana memainkan perannya sebagai penyeimbang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pembagian lebih lanjutnya hukum pidana secara cakupan aturan dibagi menjadi dua bagian, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja.⁵ Dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana umum ialah hukum

⁴ http://jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf di unduh pada tanggal 10-januari-2015 pukul 15:12.

⁵ Farid, Zainal Abidin. 2010. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm 18.

yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang diatur diluar dari KUHP. Sudarto berpendapat, bahwa pembentukan undang-undang pidana khusus yang mempunyai asas-asas hukum pidana umum tidak menghilangkan kewajiban para pelaksana hukum untuk menghormati asas hukum “tidak ada pidana tanpa kesalahan”.⁶

Salah satu bagian dari tindak pidana khusus yang akan dibahas adalah pidana ekonomi. Hukum pidana ekonomi menurut Andi Hamzah adalah bagian dari hukum pidana, yang merupakan corak-corak tersendiri, yaitu corak-corak ekonomi. Beberapa bagian dari hukum pidana ekonomi yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan masih banyak lagi yang terkait dengan perekonomian.

Setelah jelas perbedaan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, penulis ingin mengajak pembaca untuk melihat masalah hukum pidana dewasa ini, terkhusus pada masalah tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau lebih dikenal sebagai “*money laundering*”. Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya.⁷ Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut Laundromats yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha

⁶ Ibid, hlm. 21

⁷ Sutedi, Adrian. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm 1.

lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran.⁸

Secara umum, *money laundering* merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana.⁹ Kegiatan pencucian uang melibatkan pencucian uang yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*.¹⁰

Pencucian uang dewasa ini sudah merambah berbagai aspek dan berkembang sejalan dengan berkembangnya teknologi. Para pelaku pencucian uang memanfaatkan teknologi sebagai alat dan penyedia jasa keuangan/Perbankan sebagai wadah untuk melakukan tindakan pencucian uang. Kejahatan kerah putih dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi mulai dari manual hingga *extra sophisticated* atau supercanggih yang memasuki dunia maya (*cyberspace*) sehingga kejahatan kerah putih dalam pencucian uang disebut dengan *cyber laundering* merupakan bagian dari *cybercrime* yang didukung oleh pengetahuan tentang bank, bisnis, dan *electronic banking* yang cukup.¹¹

Karena perkembangan terhadap pencucian uang sangat pesat khususnya dalam transaksi perbankan hingga merugikan perekonomian negara, maka

⁸ Ibid, hlm 2A

⁹ Yunus Husein. Makalah: "Upaya Pemberantasan Pencucian Uang", hlm 2.

¹⁰ Ibid, hlm 2.

¹¹ Sutedi, Adrian. Op.cit, hlm 100

pemerintah bersama DPR membuat beberapa Undang-Undang mengenai masalah pencucian uang dalam transaksi perbankan dengan harapan dapat meminimalisir dan/atau memberantas TPPU. Beberapa Undang-Undang tersebut sebagai berikut: (1). UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; (2). UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Bank Indonesia. Tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa aturan lain yang dapat menunjang terhadap pemberantasan pencucian uang.

Walaupun Pemerintah bersama DPR telah membuat beberapa regulasi mengenai TPPU tetapi Pelanggaran terhadap tindak pidana pencucian uang masih marak terjadi terkhususnya pada transaksi perbankan. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk mengkaji masalah ini.

Dengan mengambil contoh kasus pada hasil putusan Mahkamah Agung dengan nomor: 1175 K/ Pid.Sus/2010. Penulis mencoba untuk membedah permasalahan TPPU tersebut dengan rumusan masalah yang akan dipaparkan selanjutnya.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan
2. Bagaimanakah peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam transaksi perbankan.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan
2. Untuk mengetahui peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam transaksi perbankan.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai bahan referensi sekaligus sebagai bahan wacana bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan pengembangan hukum kepidanaan secara khusus dalam bidang pencucian uang.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan wawasan khasana ilmu pengetahuan bagi para penegak hukum dalam menangani masalah mengenai pencucian uang terlebih dalam pencucian uang dalam transaksi perbankan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Ekonomi

1. Pengertian Hukum Pidana

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti obyektif, yang juga sering disebut *ius ponale* meliputi:

- (1) Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaian telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan harus diindahkan oleh setiap orang;
- (2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu; d.k.l. hukum *penentiair* atau hukum sanksi;
- (3) Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah negara tertentu.

Di samping itu, hukum pidana dipakai juga dalam arti subjektif yang lazim juga disebut *ius puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana (Hazewinkel-Suringa, 1973:3).¹²

¹² Farid,Zainal Abidin.2010.Hukum Pidana 1.Sinar Grafika.Jakarta, hlm 1.

2. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah *peristiwa pidana* atau *perbuatan pidana* atau *tindak pidana*. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Moeljatno menyatakan bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.¹³

3. Pengertian Tindak Pidana umum dan Tindak Pidana Khusus

Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja, misalnya anggota-anggota angkatan perang (istilah U.U.D 1945) atau anggota Angkatan Bersenjata (karena

¹³ <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>

dimasukannya Angkatan Kepolisian kemudian), ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tentang delik-delik tertentu saja, misalnya hukum fiskal (Pajak), Hukum Pidana Ekonomi, dan sebagainya.¹⁴ Hukum Pidana khusus juga meliputi hukum pidana yang diberlakukan terhadap golongan orang-orang khusus (Sudarto, 1981:61), misalnya golongan Angkatan Bersenjata tersebut di atas.¹⁵

4. Tindak Pidana Ekonomi

Tindak pidana ekonomi adalah suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting dalam masyarakat atau pekerjaannya. Pengertian kejahatan ekonomi adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonomian dan bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana.

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- (1) Suatu perbuatan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.
- (2) Dilakukan oleh seorang atau korporasi didalam pekerjaannya yang sah atau di dalam pencarian atau usahanya di bidang industri atau perdagangan.
- (3) Untuk tujuan memperoleh uang atau kekayaan, untuk menghindari pembayaran uang atau menghindari kehilangan atau kerugian kekayaan, memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi dengan cara melawan hukum.

¹⁴ Farid,Zainal Abidin.Op.cit, hlm 18.

¹⁵ Ibid, hlm 19.

Bentuk-bentuk tindak pidana ekonomi:

- (1) Pelanggaran penghindaran pajak
- (2) Penipuan atau kecurangan di bidang perkreditan (*credit fraud*)
- (3) Penggelapan dana-dana masyarakat (*embezzlement of public funds*) dan penyelewengan dana-dana masyarakat (*missappropriation of public funds*)
- (4) Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keuangan (*violation of currency regulations*)
- (5) Spekulasi dan penipuan dalam transaksi tanah (*speculation and swindling in land transaction*) serta penyelundupan (*smuggling*)
- (6) Delik-delik lingkungan
- (7) menaikkan harga (*over pricing*) serta melebihi harga faktur (*over invoicing*), juga mengekspor dan mengimpor barang-barang di bawah standar dan bahkan hasil produksi yang membahayakan (*export and import of substandart and dangerously unsafe products*)
- (8) Eksploitasi tenaga kerja (*labour exploitation*)
- (9) Penipuan konsumen (*coustamer fraud*)

Salah satu bentuk rill tindak pidana ekonomi adalah kejahatan komersial yaitu kejahatan yang berhubungan dengan ekonomi perdagangan dan keuangan.

Kategori kejahatan komersial:

- (1) Penyimpangan perbankan yaitu penipuan uang muka L/C, promes dan wesel, pemalsuan uang penyimpanan dalam pengiriman uang.

- (2) Penyimpangan perdagangan yaitu kepailitan, kejahatan perdagangan, perubahan aset perusahaan dan pemalsuan kontrak.
- (3) Penyimpangan pembayaran perdagangan eceran, cek palsu, kredit palsu, cek kosong.
- (4) Penyimpangan yang berkaitan dengan iverstasi, surat-surat berharga, saham dan obligasi palsu, manipulasi pasar, penyimpangan pasar.
- (5) Penyimpangan pajak dan kejahatan asuransi.

B. Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

1. Sejarah dan Perkembangan Pencucian Uang (*Money Laundering*).

Problematisasi pencucian uang yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *money laundering* sekarang mulai dibahas dalam buku-buku teks, apakah itu buku teks hukum pidana atau kriminologi.¹⁶ Ternyata problematika uang haram ini sudah meminta perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melnggara batas-batas negara.¹⁷ Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang dinamakan *organized crime*, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan.¹⁸ Erat bertalian dengan hal terakhir ini adalah dunia perbankan yang pada satu sisi

¹⁶ Sutedi, Adrian. 2007. Hukum Perbankan suatu tinjauan pencucian uang, merger, likuidasi, dan kepailitan. Jakarta.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

beroperasi atas dasar kepercayaan para konsumen, namun pada sisi lain, apakah akan membiarkan kejahatan pencucian uang ini terus merajalela.¹⁹

Al Capone, Penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai si genius Mayer Lansky, Orang Polandia. Lansky, seorang akuntan, mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (*Laundry*).²⁰ Demikian asal muasal muncul nama *money laundering*.

Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika Mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya.²¹ Investasi terbesar adalah perusahaan pencuci pakaian atau disebut *Laundromat* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat.²² Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran.

Pada tahun 1980-an uang hasil kejahatan semakin berkembang, dengan berkembangnya bisnis haram seperti perdagangan narkotik dan obat bius yang mencapai miliaran rupiah sehingga kemudian muncul istilah *narco dollar*, yang berasal dari uang haram hasil perdagangan narkotika.²³

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ Ibid.

2. Pengertian Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Tidak ada definisi yang seragam dan komperhensif mengenai oencucian uang atau *money loundering*. Masing-masing negara memiliki definisi mengenai pencucian uang sesuai dengan terminologi kejahatan menurut hukum negara yang bersangkutan. Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara-negara yang telah maju dan negara-negara dari dunia ketiga, masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Tetapi semua negara sepakat, bahwa pemberantasan pencucian uang sangat penting untuk melawan tindak pidana terorisme, bisnis narkoba, penipuan ataupun korupsi.²⁴

Terdapat beberapa pengertian mengenai pencucian uang (*money loundering*). Secara umum, pengertian atau definisi tersebut tidak jauh berbeda satu sama lain. *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian pencucian uang sebagai *term used ti describe investment or of other transfer of money flowing from rocketeeting, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that is original source cannot be traced*. (Pencucian uang adalah istilah untuk menggambarkan investasi dibidang-bidang yang legal melalui jalur yang sah, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal usulnya). Pencucian uang adalah proses menghapus jejak asal uang hasil kegiatan ilegal atau kejahatan melalui serangkaian kegiatan investasi atau transfer yang dilakukan

²⁴ Yustiavandana,Ivan(dkk). 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Ghalia Indonesia. Bogor, hlm 10.

berkali-kali dengan tujuan untuk mendapatkan status legal untuk uang yang diinvestasikan atau dimusnahkan ke dalam sistem keuangan.²⁵

Beberapa pengertian pencucian uang menurut para ahli:

(1) Menurut Welling

Pencucian uang adalah proses menyembunyian keberadaan sumber tidak sah atau aplikasi pendapat tidak sah, sehingga pendapatan itu menjadi sah.

(2) Menurut Fraser

Pencucian uang adalah sebuah proses yang sungguh sederhana dimana uang kotor di proses atau dicuci melalui sumber yang sah atau bersih sehingga orang dapat menikmati keuntungan tidak halal itu dengan aman.

(3) Menurut Prof.Dr.M.Giovanoli

Money laundering merupakan proses dan dengan cara seperti itu, maka aset yang di peroleh dari tindak pidana dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah berasal dari sumber yang sah.

(4) Mr.J.Koers

Money laundering merupakan suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan kedalam suatu peredaran yang sah dan menutupi asal-usul tersebut

(5) Byung-Ki Lee

Money laundering merupakan proses memindahkan kekayaan yang di peroleh dari aktivitas yang melawan hukum menjadi modal yang sah.

²⁵ Ibid.

Pengertian pelaku tindak pidana pencucian uang menurut UU no 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada pasal (3) sebagai berikut: Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, dan menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).²⁶

3. Tahap-tahap dan proses pencucian uang

Untuk melaksanakan tindak pidana pencucian uang, para pelaku memiliki metode tersendiri dalam melakukan tindak pidana tersebut. Walaupun setiap pelaku sering melakukan dengan menggunakan metode yang bervariasi tetapi secara garis besar metode pencucian uang dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu Placement, Layering, dan Integration. Walaupun ketiga metode tersebut dapat berdiri sendiri atau mandiri terkadang dan tidak menutup kemungkinan ketiga metode tersebut dilakukan secara bersamaan.

Berikut adalah penjelasan dari metode pencucian uang tersebut:

(1) Placement

Tahap ini merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut menandatangani uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial*

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

system). Karena uang itu sudah masuk ke dalam sistem keuangan perbankan, berarti uang itu juga telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena uang yang telah ditempatkan pada suatu bank itu selanjutnya dapat dipindahkan ke bank lain, baik dinegara tersebut maupun di negara lain, uang tersebut bukan saja telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan, melainkan juga telah masuk kedalam sistem keuangan global atau international.²⁷

(2) Layering

Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses perpindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.²⁸

(3) Integration

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materiil atau keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu

²⁷ Sutedi, Adrian. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm 19

²⁸ Ibid.

mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dilakukan karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan dan menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhir dapat dinikmati atau digunakan secara aman.²⁹

Ketiga kegiatan tersebut diatas dapat terjadi secara terpisah atau stimulan, namun secara umum dilakukan secara tumpang tindih. *Modus Operandi* pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal itu terjadi, baik pada tahapan *placement*, *layering*, maupun *integration* sehingga penanganannya pun menjadi semakin sulit dan membutuhkan peningkatan kemampuan (*capacity building*) secara sistematis dan berkesinambungan. Pemilihan *modus operandi* pencucian uang bergantung pada kebutuhan pelaku tindak pidana.

4. Metode Pencucian Uang (*Money Laundering*).

Perlu pula diketahui bagaimana para pelaku *money laundering* melakukan money laundering, sehingga bisa dicapai hasil dari uang ilegal menjadi uang legal. Secara metodik dapat dikenal tiga metode dalam *money laundering* yaitu:

(1) Metode *buy and sell conversion*

Metode ini dilakukan melalui transaksi barang-barang dan jasa. Katakanlah suatu aset dapat dibeli dan dijual kepada konspirator yang bersedia membeli atau menjual secara lebih mahal dari harga normal dengan mendapatkan *fee* atau diskon. Selisih harga dibayar dengan uang ilegal dan kemudian dicuci dengan cara transaksi bisnis. Barang dan jasa

²⁹ Ibid.

itu dapat diubah seolah-olah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.

(2) Metode *offshore conversion*

Dengan cara ini uang kotor di konversi ke suatu wilayah yang merupakan tempat yang sangat menyenangkan bagi penghindar pajak (*tax heaven money laundering centres*) untuk kemudian didepositkan di bank yang berada di wilayah tersebut. Di negara-negara yang termasuk atau beciri *tax heaven* demikian memang terdapat sistem hukum perpajakan yang tidak ketat, terdapat sistem rahasia bank yang sangat ketat, birokrasi bisnis yang cukup mudah untuk memungkinkan adanya rahasia bisnis yang ketat serta pembentukan usaha *trust fund*. Untuk mendukung kegiatan demikian, para pelakunya memakai jasa-jasa pengacara, akuntan, dan konsultan keuangan dan para pengelola yang handal untuk memanfaatkan segala celah yang ada di negara itu.

(3) Metode *legitimate business conversions*.

Metode ini dilakukan melalui kegiatan bisnis yang sah sebagai cara pengalihan atau pemanfaatan dari suatu hasil uang kotor. Hasil uang kotor ini kemudian dikonvensi dngan cara ditransfer, cek atau cara pembayaran lain untuk disimpan direkening bank atau ditransfer kemudian kerekening bank lainnya. Biasanya para pelaku bekerja sama dengan suatu perusahaan yang rekeningnya dapat dipergunakan untuk menampung uang kotor tersebut.³⁰

³⁰ Siahaan. 2008. *Money laundering dan kejahatan perbankan*. Jala. Jakarta, hlm 26.

5. Kriminalisasi pencucian uang

Menurut Guy Stessen (2000), secara umum ada 3 alasan pokok mengapa praktik pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana.

Pertama, karena pengaruhnya pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumberdaya dan dana. Dengan adanya praktik pencucian uang, maka sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat, disamping itu dana banyak yang kurang dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terjadi karena uang hasil tindak pidana terutama diinvestasikan pada negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya, walaupun hasilnya lebih rendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya baik ke perekonomiannya kurang baik. Karena pengaruh pengaruh negatifnya pada pasar finansial dan dampaknya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional, praktik pencucian uang dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada perekonomian internasional, dan kejahatan terorganisir yang melakukan pencucian uang dapat juga membuat ketidakstabilan pada ekonomi nasional. Flukturasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga mungkin juga merupakan akibat negatif dari praktik pencucian uang. Dengan berbagai dampak negatif itu diyakini bahwa praktik pencucian uang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia.

Kedua, dengan ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadangkala sulit disita, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah

dipindahtanggankan pada pihak ketiga. Dengan pendekatan *follow the money*, kegiatan menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil tindak pidana dapat dicegah dan diberantas. Dengan kata lain, orientasi pemberantasan tindak pidana sudah beralih dari “menindak pelakunya” kearah menyita “hasil tindak pidana”. Dibanyak negara dengan menyatakan praktik pencucian uang sebagai tindak pidana merupakan dasar bagi penegak hukum untuk mempidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum.

Ketiga, dengan dinyatakannya praktik pencucian uang sebagai tindak pidana dan dengan adanya kewajiban pelaporan transaksi keuangan, maka hal ini akan lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana pencucian uang samapi kepada tokoh yang ada dibelakangnya. Tokoh ini sulit dilacak dan ditangkap karena pada umumnya mereka tidak kelihatan pada pelaksanaan suatu tindak pidana, tetapi banyak menikmati hasil tindak pidana.³¹

6. Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Umum.

Penanganan tindak pidana pencucian uang sebagaimana halnya tindak pidana lainnya yang pada umumnya ditangani kejaksaan dimulai dengan penerimaan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) berdasarkan ketentuan pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya, berjalan sebagaimana acara yang berlaku sesuai ketentuan dalam KUHP.

Perlu diingat bahwa tindak pidana pencucian uang ini tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan

³¹ Widjaya Tunggal, Amin. 2014. *Pencegahan Pencucian Uang*. Harvarindo. Jakarta.

cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*). Hal ini dapat kita ketahui dari rumusan pasal 2, yaitu harta kekayaan yang asal usulnya atau diperoleh dari tindak pidana tersebut (pasal 2 ayat (1) a-z) adalah hasil tindak pidana.

Timbul suatu pertanyaan, bagaimana tindakan penanganan pencucian uang sehubungan dengan penjelasan diatas, (karena asalnya juga dari tindak pidana)? Apakah *predicate crime* diperiksa dahulu dan dibuktikan, baru tindak pidana pencucian uangnya diperiksa? Dalam tindak pidana pencucian uang tidak demikian karena sudah dijelaskan jawabannya, yaitu dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 UU no 25 tahun 2003 yang berbunyi: "terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang."

Artinya untuk melakukan penyelidikan, penuntutan tindak pidana pencucian uang tidak perlu disidik dan dituntut *predicate crimenya* terlebih dahulu karena titik beratnya pada tindak pidana pencucian uang.

7. Dampak Kejahatan Pencucian uang

Kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan dan oleh para penjahat individual sangat merugikan masyarakat. Karena itu banyak negara berupaya memerangi kejahatan ini. Beberapa dampak kejahatan pencucian uang terhadap masyarakat, yakni:

- (1) Pencucian uang memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup, dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk

memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau pecandu narkotik.

- (2) Kegiatan pencucian uang mempunyai potensi untuk merongrong keuangan masyarakat (*financial community*) sebagai akibat sedemikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.
- (3) Pencucian uang mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.

Beberapa dampak makro ekonomis yang ditimbulkan oleh pencucian uang adalah distribusi pendapatan. Kegiatan kejahatan mengalihkan pendapatan dari penyimpan dana terbesar (*high saver*) kepada penyimpan dana terendah (*low Saver*), dari investasi yang sehat pada investasi yang beresiko dan berkualitas rendah. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi terpengaruh. Misalnya terdapat bukti bahwa dana yang berasal dari *tax evasions* di Amerika Serikat cenderung disalurkan pada investasi yang beresiko tinggi, tetapi memberikan hasil yang tinggi di sektor bisnis kecil. Beberapa *tax evasions* yang terjadi di sektor ini terutama pada kecurangan (*fraud*), penggelapan (*embezzlement*), dan perdagangan saham melalui orang dalam (*insider trading*) berlangsung secara cepat dan merupakan bisnis yang menguntungkan di sektor bisnis kecil ini.³²

³² Adrian Sutedi. Loc.cit.

Beberapa kerugian akibat pencucian uang menurut Drs. Amin Widjaja Tunggal, Ak, CPA, MBA sebagai berikut:

- (1) Merongrong sektor swasta yang sah (*Undermining the Legitimate Private Sector*)
- (2) Merongrong integritas pasar keuangan (*Undermining the Integrity of Financial Market*). Lembaga keuangan (*financial institution*) yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas.
- (3) Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya (*Loss of control of economic policy*)
- (4) Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi (*Economic Distortion and Instability*).
- (5) Hilangnya pendapatan negara dari sumber pemabayaran pajak (*Loss of Revenue*).
- (6) Membahayakan upaya privatisasi perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah (*Risk of Privatization Efforts*).
- (7) Menimbulkan rusaknya reputasi negara (*Reputation Risk*).
- (8) Menimbulkan biaya sosial (*social Cost*) yang tinggi.³³

8. Rezim anti Pencucian Uang

(1) International

Setelah PBB mengeluarkan sejumlah konvensi mengenai anti pencucian uang, negara-negara melanjutkan upaya gerakan international anti pencucian uang

³³ Widjaja Tunggal, Amin. Loc.cit.

ke dalam bentuk kerjasama yang lebih nyata dan spesifik. Sejumlah negara Eropa mengadakan pertemuan dan melahirkan sejumlah kesepakatan internasional yang meliputi pembentukan forum koordinasi dan lembaganya yang bekerja dalam waktu yang lama dalam upaya pemberantasan dan pencegahan pencucian uang.

Berikut adalah beberapa organisasi anti pencucian uang International:

a. Egmont Group

Egmont adalah nama sebuah tempat di Brussel Belgia dimana para badan-badan perwakilan pemerintah dan organisasi internasional pada juni 1995 bertemu untuk mendiskusikan pencucian uang dan cara untuk memerangnya. Hasil pertemuan ini menghasilkan inisiatif pembentukan wadah yang dapat mempersatukan gerakan internasional anti pencucian uang dan pembiayaan terorisme dalam sebuah wadah yang dikenal sebagai Egmont Grup.

b. Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)

Egmont Grup menyadari bahwa forum internasional tidaklah memadai untuk menjaga konsistensi upaya pemberantasan dan pencegahan pencucian uang. *Egmont Grup* kemudian memformalisasikan upaya pemberantasan dan pencegahan pencucian uang pada tingkat internasional melalui kelembagaan institutif koordinatif. Badan itu akan mengkoordinasikan mengevaluasi pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan pencucian uang. Badan itu juga dapat melakukan pelabelan status, hingga memberikan tindakan balasan pada negara-negara yang tidak dapat diajak bekerjasama dalam memberantas dan mencegah pencucian uang. Untuk itu dibentuklah *Financial Action Task Force on Money laundering* (FATF) oleh kelompok 7 Negara (G-7) dalam G-7 summit di Paris, Perancis pada bulan Juli 1989.

c. Asia Pasific Group On Money Laundering (APG)

Asia pacific group on money laundering secara resmi didirikan pada Februari 1997 di Bangkok, pada simposium pencucian uang asia-pasifik. Pembentukan APG ini merupakan titik puncak kesadaran yang terus menguat yang dibangun oleh FATF di seluruh dunia, termasuk dikawasan Asia Pasifik. Globalisasi dan masififikasi gerakan anti pencucian uang sebagai jawaban atas canggihnya modus dan teknik dan meluasnya pencucian uang.³⁴

Dan masih banyak lagi organisasi anti pencucian uang international yang berda di belahan dunia.

(2) Domestik

Di Indonesia rezim anti pencucian uang pertama kali di mualai ketika di Undang-Undangkannya mengenai pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Peraturan pegenai anti pencucian uang tersebut terus berkembang mengikuti kebutuhan dan perkembangan Indonesia. Berikut peraturan mengenai anti pencucian uang di Indonesia:

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Salah satu faktor diberlakukannya pertaturan mengenai anti pencucian uang di Indonesia dikarenakan tuntutan International untuk segera membuat Undang-Undang mengenai anti pencucian uang. Indoneisa sempat dimasukkan kedalam daftar hitam (black list) sebagai negara yang tidak berkoordinasi dala pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Maka dari itu Indonesia segera membentuk aturan tersebut agar berlaku di Indonesia.

³⁴ Yustisiavandana,Ivan. 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Ghalia Indonesia. Bogor, hlm 98.

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Setelah Indonesia membuat undang-undang tentang anti pencucian uang Indonesia belum sepenuhnya keluar dari daftar hitam (*black list*) FATF dan masih dalam pengawasan. Indonesia masih terancam masuk ke dalam daftar hitam karena undang-undang tentang anti pencucian uang yang telah di undang-undangkan belum memenuhi kriteria yang dibentuk oleh FATF. Karena itu Indonesia segera membuat peraturan yang baru yaitu UU no 23 tahun 2003.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang sebagai mana telah diubah dari Undang-Undang nomor 23 Tahun 2003 jo Undang-Undang nomor 15 tahun 2002. Setelah 7 tahun Indonesia telah menjalankan Undang-Undang nomor 23 tahun 2003. Indonesia kembali memperbaharui Undang-Undang mengenai pemberantasan dan pencegahan pencucian uang yang di Undang-Undangkan pada tahun 2010. Ini menandakan bahwa Indonesia dengan serius menanggapi masalah pencucian uang yang terus berkembang di berbagai aspek.

Dalam UU terbaru ini Indonesia lebih menekankan pada:

1. Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkannya dengan uang-uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

2. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan pada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, pentitipan, penukaran atau penggunaan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
3. Dalam pasal 4 UU RI nomor 8 tahun 2010, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembuyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang yakni mulai dari hukuman penjara maksimum 20 tahun dengan denda paling banyak 10 miliar rupiah.

9. Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana pencucian uang harus diberantas karena pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang sangat besar atau asal usul harta kekayaan itu merupakan hasil kejahatan, kemudian disembunyikan atau di samarkan dengan berbagai cara yang dikenal dengan pencucian uang. Kejahatan ini semakin lama semakin meningkat, oleh karena itu harus dicegah, bahkan harus diberantas agar intensitas kejahatan yang

menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat di minimalisasi sehingga stabilitas perekonomian negara dan keamanan negara terjaga. Pencucian ini merupakan kejahatan transnasional karena melintasi batas wilayah negara-negara. Pemberantasan ini tidak dapat di lakukan sendiri tetapi agar efektif harus di lakukan kerja sama internasional melalui forum bilateral atau multilateral dan harus memenuhi standar internasional.³⁵

Beberapa lembaga yang ikut berperan dalam proses pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

(1) Peranan Pusat dan Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Pemegang peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang di indonesia ada di tangan PPATK. Karena, jika PPATK tidak menjalankan fungsinya dengan benar, maka efektifitas dari pelaksanaan undang-undang PPTU tidak akan tercapai. Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Meminta dan menerima laporan dari penyedia jasa keuangan.
- b. Meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah di laporkan kepada penyidik atau penuntut umum.
- c. Melakukan audit terhadap penyedia jasa keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang terhadap pedoman pelaporan menegani transaksi keuangan.

³⁵ Sutedi, Adrian. Op. cit, hlm 176.

d. Memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai.³⁶

(2) Peranan Polisi dalam melakukan investigasi terhadap perkara Pencucian Uang.

Berkenaan dengan tugas penyidikan, polisi harus memperoleh alat bukti yang akan diajukan pada jaksa untuk selanjutnya di ungkapkan di persidangan dan untuk perkara pencucian uang bukanlah masalah mudah apalagi harus di kaitkan dengan kejahatan asalnya. Peranan polisi juga sangat dominan manakala berkaitan dengan pengambilan harta kekayaan, hasil tindak pidana diluar negeri. Kemudian, di bidang teknologi informasi memungkinkan kejahatan pencucian uang bisa terjadi melampaui batas kedaulatan suatu negara. Karena itu untuk mencegah dan memberantasnya memerlukan kerjasama antar negara.

Penyidikan juga akan semakin rumit ketika melibatkan penggunaan jasa *wiretransfersystem*. Hal ini tampaknya disebabkan tuntutan efisiensi, kecenderungan ekonomi, teknologi, dan tuntutan pasar terbuka. Sejak 1989 hampir semua negara telah menerapkan *wiretransfersystem* secara internal antar bank dan lembaga keuangan (*transferring fund by electronic message between banks-wire transfer*). Ini merupakan cara untuk memindahkan dana ilegal dengan cepat dan tidak mudah dilacak oleh jangkauan hukum, dimana sekaligus pada saat yang sama terjadilah pencucian uang dengan cara mengacaukan *audit trail*. Cara ini juga sering di sebut sebagai *electronic fund transfer (EFT)* atau *cyber payment* yang merupakan salah satu jasa yang diberikan oleh *electronic banking* yang

³⁶ Yustia Vandana, Ivan (dkk). Op. cit.

memungkinkan pembayaran transfer berlangsung dengan mobilitas tinggi dengan mengoptimalkan jaringan perbankan internasional (*internasional of sue banking centers*) sebagai lembaga intermediasi.

Selain itu, polisi juga harus menentukan fakta untuk dibuktikan jaksa yang meliputi unsur subjektif (*mens rea*) dan unsur objektifnya (*actus reus*). *Mens rea* yang harus juga di buktikan, yaitu *knowledge* (mengetahui atau patut menduga) dan *intended* (bermaksud). Kedua unsur tersebut berkaitan dengan unsur terdakwa “mengetahui bahwa dana tersebut berasal dari hasil kejahatan” dan “terdakwa mengetahui tentang atau maksud untuk melakukan transaksi”. Untuk memenuhi unsur yang harus di buktikan jaksa tersebut sangat sulit, “mengetahui atau cukup menduga apalagi bermaksud untuk menyembunyikan hasil kejahatan, benar-benar harus di dukung berbagai faktor terutama dari pelaku dan kebiasaan pelaku”.

(3) Peranan jaksa dan problema pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam pengamatan selama Indonesia mempunyai ketentuan anti-pencucian uang, maka tampaknya kegagalan terbesar terletak pada kelemahan jaksa dalam membuktikan perkara ini. Masalah berawal dari penuntutan yang ternyata tidak sederhana, pertama berkenaan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan (*follow up crimes*) sehingga ada permasalahan lain, yaitu bagaimana dengan *corecrime* atau *predicate offence* (kejahatan utamanya). Apakah harus di buktikan keduanya atau cukup pencucian uangnya saja tanpa terlebih dahulu membuktikan *corecrime* atau *predicate offence*. Berdasarkan

amanat undang-undang, maka *predicate offence*nya tidak perlu di buktikan, artinya cukup menggunakan bukti petunjuk saja. Sebagai konsekuensinya, maka dakwaan harus di susun secara kumulatif bukan alternatif karena antara *predicate offence* dan pencucian uang adalah dua kejahatan yang walaupun perbuatan pencucian uang selalu harus di kaitkan dengan *predicate offence*nya, pencucian uang adalah kejahatan yang berdiri sendiri (as a separate crime). Dengan demikian, dalam mendakwa tindak pidana pencucian uang, misalnya, berkaitan dengan dakwaan pasal 3, maka *predicate offence* dan *follow up crimen*nya didakwakan sekaligus.

Namun, adakalanya terhadap tiga dakwaan bisa saja tunggal, yaitu ketiga seseorang melakukan proses pencucian uang atas hasil kejahatan dimana pelaku tidak terlibat langsung dengan kejahatan, tetapi dia patut menduga bahwa uang tersebut berasal dari kejahatan. Untuk pelaku ini tidak harus di pertanggung jawabkan *predicate offence*, tetapi hanya tindak pidana pencucian uangnya. Selanjutnya, masih ada dakwaan tunggal untuk tindak pidana pencucian uang yang tidak harus di kaitkan dengan *predicate offence*nya. Dalam hal ini, misalnya, pelaku hanya berkenaannya dengan dakwaan pasal 6, dimana pelaku hanya di pertanggung jawabkan atas perbuatan pencucian uang pasif, yaitu menerima dan lain-lain atas harta kekayaan yang di ketahui atau patut di duga bahwa harta tersebut berasal dari kejahatan. Dalam hal pelaku hanya berkaitan dengan pasal 6, maka dakwaannya bersifat tunggal atau di dakwa alternatif dengan pasal lain yang relevan. Yang penting harus sesuai dengan fakta bahwa perbuatan hanya satu.

(4) Peranan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pencucian Uang.

Berkenaan dengan karakteristik yang unik dari tindak pidana pencucian uang, peranan hakim sangat menentukan untuk tujuan pemberantasan kejahatan ini. Hakim harus mempunyai sifat fisioner yang didasarkan pada pemahaman bahwa pembuktian kejahatan ini sangat sulit karena harus membuktikan kejahatan sekaligus. Profesionalitas hakim sangat diperlukan untuk mengikuti semua sistem acara peradilan yang banyak menggunakan pendekatan pragmatis, misalnya, adanya perlindungan saksi dan adanya praktik acara pembalikan beban pembuktian (*the shifting of the burden of proof*).

Undang-undang tindak pidana pencucian uang belum mengatur secara rinci tentang acara persidangan khususnya untuk pembalikan beban pembuktian ini, tetapi pada masa depan hal ini harus dilakukan. Selain tata cara yang ditentukan, hakim juga harus sangat memahami bahwa mengingat penerapan pembalikan beban pembuktian pada dasarnya melanggar prinsip *nonself incrimination*, maka harus ditegaskan bahwa penerapan ini sangat terbatas pada tahap persidangan dan hanya untuk satu unsur. Unsur yang dibuktikan oleh terdakwa adalah bahwa harta kekayaan bukan berasal dari kejahatan. Artinya, apabila unsur ini tidak bisa dibuktikan oleh terdakwa, jaksa harus tetap membuktikan unsur lainnya, baik itu unsur objektif maupun subjektif, sepanjang itu merupakan inti delik (*bestandelen*).

Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah sikap hakim apabila ide tentang bukti pendukung (*circumstantial evidence*) akan diterapkan. Pemikiran

tentang pembuktian unsur (*intende*) yaitu dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan dan seterusnya, yang harus di anggap terbukti sepanjang semua unsur di depannya telah dibuktikan oleh jaksa, maka hakim seharusnya melakukan lompatan pemikiran untuk mengambil kesimpulan bahwa unsur *intended* pasti terbukti. Dalam hal ini berlaku suatu logika hukum, yaitu dimana terdakwa yang telah terbukti sengaja melakukan transfer misalnya dan kemudian dia juga terbukti mengetahui atau paling tidak patut menduga bahwa harta kekayaan yang di transfer berasal dari kejahatan, maka seharusnya dapat disimpulkan tujuan transfer tersebut untuk hal yang tidak baik, yaitu menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kekayaan. Terhadap ide ini hakim harus benar-benar mempunyai keberanian yang dilandasi keyakinannya atau logika hukum yang ditawarkan tersebut. Untuk mencapai profesionalitas yang memadai serta inovatif tersebut, sangat diperlukan wawasan yang luas terutama dalam mempelajari teori pembuktian yang telah dilakukan diberbagai negara yang telah banyak pengalaman dalam pengungkapan perkara pencucian uang dipengadilan.³⁷

10. Pembuktian terbalik pada Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pembuktian adalah suatu proses kegiatan untuk membuktikan sesuatu atau menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa. Pasal 183 KUHAP menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang

³⁷ Sutedi, Adriam. Op.cit, hlm 210.

bersalah melakukannya.”Sedangkan mengenai ketentuan alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yang berbunyi :

1. Alat bukti yang sah ialah: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa.
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

UUPU menganut pula sistem pembuktian terbalik, dimana justru terdakwa sendirilah yang diwajibkan untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Pasal 35 UUPU menyatakan: “untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”.

Ketentuan pasal ini menyimpang dari prinsip “jaksa membuktikan”, yakni prinsip hukum pidana yang menganut bahwa jaksa wajib membuktikan dalil-dalil dakwaan yang diajukannya.

Penerapan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang patut diberlakukan di Indonesia sebagai tindak lanjut dari pasal 77 UU No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berbunyi “*untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.*” Jikalau kita mengimplementasikan pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, artinya dalam konsep negara hukum, supremasi hukum harus dijunjung tinggi di Negara ini. Maka dari itulah mengapa dirasa perlu menerapkan sistem beban pembuktian terbalik ini dalam tindak pidana pencucian uang khususnya. Dan jika ditinjau dari

aspek pasal 35 UU No. 8 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa “*yaitu jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul harta kekayaannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang*”. Dalam hal ini terlihat begitu pentingnya penerapan system pembuktian secara terbalik.

Sistem beban pembuktian terbalik sudah diterapkan pertama kali di Indonesia diterapkan di pengadilan negeri Jakarta selatan, yaitu kepada bekas pejabat kantor pajak dan bappenas, bahasyim assifie. Dalam proses terssebut, bahasyim assifie diminta membuktikan keabsahan hartanya yang dia sebut hasil dari berbagai usaha. Bahasyim memang menunjukan berbagai dokumen yang ia katakana sebagai hasil dari usahanya sendiri. Namun majelis hakim tidak mengakui seluruh bukti tersebut karena tidak sah menurut hukum. Akhirnya bahasyim divonis hukuman penjara selama 10 tahun, ditambah denda Rp.250 juta subside 3 bulan kurungan. Hartanya pun yang senilai Rp. 60,9 miliar ditambah 681.147 dollar AS dirampas untuk Negara karena terbukti merupakan hasil dari tindak pidana korupsi.

C. Perbankan

1. Pengertian Hukum Perbankan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Hukum Perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan Perbankan. Tentu untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai pengertian hukum perbankan tidaklah cukup hanya dengan memberikan suatu rumusan yang demikian. Oleh karena itu, perlu dikemukakan beberapa pengertian hukum perbankan dari para ahli hukum perbankan.

Menurut Muh. Djumhana, hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.

Adapun Munir Fuady merumuskan hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petuga-petugasnya, hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang tidak boleh dan boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan.

Beranjak dari beberapa pengertian mengenai hukum perbankan diatas, menurut pendapat penulis dengan mengacu pada pengertian perbankan sebagai sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya, maka pada prinsipnya dapat dirumuskan bahwa hukum perbankan adalah keseluruhan norma-norma tertulis maupun norma-norma tidak tertulis yang mengatur tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya. Berkaitan dengan pengertian ini, kiranya dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan norma-norma tertulis dalam pengertian diatas adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bank, sedangkan norma-norma

yang tidak teertulis adalah hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktik perbankan.³⁸

2. Pengertian Tindak Pidana Perbankan.

Terdapat dua istilah yang sering dipakai secara bergantian walaupun maksud dan ruang lingkupnya bisa berbeda. Pertama, adalah “Tindak pidana perbankan” dan kedua, “Tindak pidana di bidang perbankan”. Yang pertama mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank, sedangkan yang kedua tampaknya lebih netral atau lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan didalam bank atau keduanya.

Istilah “tindak pidana di bidang perbankan” dimaksudkan untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Tidak ada pengertian formal darti tindak pidana di bidang perbankan. Ada yang mendefinisikan secara populer, bahwa tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*crimes though the bank*) dan sasaran tindak pidana itu (*crimes against the bank*).

3. Tindak Pidana di bidang Perbankan.

Dalam UU Perbankan terdapat tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari pasal 46 samapai dengan pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam:

³⁸ Hermansyah. 2006. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana. Jakarta, hlm 39.

- (1) Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, diatur dalam pasal 46.
- (2) Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, diatur dalam pasal 47 ayat (1) ayat (2) dan pasal 47 A.
- (3) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank, diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan ayat (2)
- (4) Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a,b dan c ayat (2) huruf a dan b, pasal 50 dan pasal 50A.

4. Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Perbankan

Selain keempat macam tindak pidana di bidang perbankan yang telah disebutkan diatas sebenarnya ada tindak pidana lain yang berkaitan sangat erat dengan kegiatan perbankan yaitu:

- a. Tindak Pidana Pasar Modal
- b. Tindak Pidana Pencucian Uang

Adapun untuk lebih jelasnya maka keempat macam tindak pidana di bidang perbankan ini akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Tindak Pidana Pasar Modal

Kebijakan formilatif mengenai Tindak Pidana Pasar Modal (TTPM) diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM), pada bab XV tentang ketentuan pidana (pasal 103-110). Menurut pasal 110, TTPM terdiri dari dua kelompok jenis tindak pidana, yaitu:

1. TPPM yang berupa “kejahatan”, diatur dalam pasal 103 Ayat (1), pasal 104, pasal 106, dan pasal 107;
2. TPPM yang berupa “pelanggaran”, diatur dalam pasal 103 Ayat (2), pasal 105, dan pasal 109.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Tindak Pidana Pasar Modal secara singkat dapat didefinisikan sebagai, segala perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Adapun peran bank dalam kegiatan pasar modal adalah sebagai berikut:

- a. Bank sebagai kustodian, yaitu sebagai pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya;
- b. Bank sebagai wali amanat, yaitu sebagai pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang.

Berdasarkan peranannya dalam kegiatan pasar modal, maka bank akan menjadi subjek TPPM jika:

- a. Melanggar pasal 43 UU Pasar Modal, yaitu menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian tanpa persetujuan Bapepam;
- b. Melanggar pasal 50 UU Pasar Modal, yaitu menyelenggarakan usaha sebagai wali amanat yang tidak terdaftar di Bapepam.

Pasal 103 Ayat (1) UU Pasar Modal menyebutkan bahwa Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau

pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

b. Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering) secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organized crime maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotik dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal.

Kegiatan money laundering dalam sistem keuangan pada umumnya dan sistem perbankan pada khususnya memiliki risiko yang sangat besar. Risiko tersebut antara lain risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi, dan risiko reputasi. Bagi perbankan Indonesia tindakan pencucian uang merupakan suatu hal yang sangat rawan karena pertama, peranan sektor perbankan dalam sistem keuangan di Indonesia seperti yang dijelaskan sebelumnya, sangatlah penting. Oleh sebab itu sistem perbankan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan rezim anti money laundering. Kedua, tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri perbankan menjadi lahan yang empuk bagi tindak kejahatan pencucian

uang dan merupakan sarana yang paling efektif untuk melakukan kegiatan money laundering. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya, sehingga asal usul uang tersebut sulit dilacak oleh penegak hukum.

Keterlibatan perbankan dalam kegiatan pencucian uang dapat berupa:

- a. Penyimpanan uang hasil kejahatan dengan nama palsu;
- b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito/tabungan/ giro;
- c. Penukaran pecahan uang hasil perbuatan illegal;
- d. Pengajuan permohonan kredit dengan jaminan uang yang disimpan pada bank yang bersangkutan;
- e. Penggunaan fasilitas transfer;
- f. Pemalsuan dokumen-dokumen yang bekerjasama dengan oknum pejabat bank terkait; dan pendirian/pemanfaatan bank gelap.

Hal tersebut dapat terjadi mengingat adanya kemudahan dalam proses pengelolaan hasil kejahatan pada berbagai kegiatan usaha bank. Disamping itu, karena organisasi kejahatan membutuhkan pengelolaan keuangan dengan cara menempatkan dananya dalam kegiatan usaha perbankan maka penggunaan bank merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam upaya mengaburkan asal-usul sumber dana. Hal tersebut menunjukkan eratnya keterkaitan antara organisasi kejahatan dan lembaga keuangan terutama bank.

5. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Costumer Principle*)

Sebagai salah satu *entry* bagi masuknya uang hasil tindak kejahatan, bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengurangi risiko dipergunakan sebagai sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transactions*) yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank atau perusahaan jasa keuangan lain. Penerapan prinsip mengenal nasabah atau lebih dikenal umum dengan *Know Your Costumer Principle* (*KYC Principle*) ini didasari pertimbangan bahwa KYC tidak saja penting dalam rangka pemberantasan pencucian uang, melainkan juga dalam rangka penerapan *prudential banking* untuk melindungi bank atau perusahaan jasa keuangan lain dari berbagai resiko dalam berhubungan dengan nasabah dan *counter-party*.

Khususnya terhadap para nasabah, pihak bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengenali para nasabah, agar bank atau perusahaan jasa keuangan lain tidak terjerat dalam kejahatan pencucian uang. Prinsip mengenal nasabah ini merupakan Rekomendasi FATF, yang merupakan prinsip ke lima belas dari dua puluh lima *Core Principles for Effective Banking Supervision* dan *Basel Committee*. Pengenalan terhadap para nasabah harus dilakukan mulai dari identitas nasabah, prosedur penerimaan nasabah, pemantauan nasabah secara kontiniu, dan kemudian pelaporan terhadap para pihak yang berwenang. Bank Indonesia selama ini telah mengharuskan kepada lembaga perbankan untuk mengenali nasabahnya.

Disektor perbankan inisiatif untuk memerangi pencucian uang secara aktif dan serius telah dimulai dengan penerapan prinsip mengenal nasabah dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang tentang penerapan Prinsip mengenal Nasabah (*Know Your Costumer Principles*).
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Costumer Principles*).
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Costumer Principles*).
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003/ tanggal 23 Oktober 2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Costumer Principles*) bagi Bank Perkreditan Rakyat.
6. Surat Edaran Nomor 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001 perihal Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

7. Surat Edaran Nomor 5/32/DPNP tanggal 4 Desember 2003 perihal perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/29/DPNP.
8. Surat Edaran Nomor 6/37/DPNP tanggal 10 September 2004 perihal penilaian dan pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan kewajiban lain terkait dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana pencucian Uang.

Penerapan ketentuan tersebut dilakukan berdasarkan antara lain 40 rekomendasi FATF dan *Core Principle* Nomor 15 dari *Basel Committee on Banking Supervision*.

Apabila menengok kebelakang, Prinsip Mengenal nasabah di Indonesia lahir sekitar tanggal 18 Juni 2002, saat Bank Indonesia mengeluarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang prinsip mengenal nasabah (*Know Your Costumer Principles*). Latar belakang bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut adalah karena semakin berkembangnya kegiatan usaha perbankan sehingga bank dihadapkan pada berbagai resiko, baik resiko operasional, hukum, terkonsentrasinya transaksi maupun resiko reputasi. Ketidacukupan prinsip mengenal nasabah, selain dapat memperbesar resiko yang dihadapi bank, juga dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi bank, baik dari sisi aktif maupun pasif.

D. Bank Indonesia

1. Pengertian Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan merupakan badan hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum.

Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berwenang menetapkan peraturan hukum pelaksana Undang-Undang yang mengikat seluruh masyarakat luas yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Selain itu Bank Indonesia juga sebagai badan hukum perdata yang dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Hal-hal tersebut telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Dewan Gubernur dan Deputy Gubernur memiliki tugas-tugas pokok dari tiga bidang utama yang menyatu disebut dengan Organisasi Bank Indonesia. Tugas-tugas pokok ini meliputi Moneter, Perbankan, dan Sistem Pembayaran yang pelaksanaan tugasnya dijamin lancar, efektif dan efisien oleh manajemen intern sebagai unit pendukung strategis. Kedepannya arsitektur organisasi Bank Indonesia diarahkan pada dua faktor tugas utama, yaitu stabilitas Moneter dan Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam pelaksanaan tugasnya ini Bank Indonesia memiliki jaringan kantor diseluruh wilayah Indonesia yang disebut dengan Kantor Bank Indonesia (KBI) dan beberapa perwakilan di luar negeri yang disebut dengan Kantor Perwakilan (KPw).



2. Kedudukan Bank Indonesia

Dilihat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, BI memiliki kedudukan sebagai lembaga negara Independen yang berada di luar Eksekutif,

Legislatif dan Yudikatif. Walaupun kedudukan BI berada diluar dari pemerintahan. Sisi positif dari status kedudukan tersebut ialah agar BI dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai Otoritas Moneter secara lebih efektif dan efisien.

Dalam hubungannya dengan Pemerintah dan DPR, BI setiap awal tahun anggaran menyampaikan informasi tertulis mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter dan rencana kebijakan moneter yang akan datang. Khusus kepada DPR, pelaksanaan tugas dan wewenang setiap triwulan dan sewaktu-waktu bila diminta oleh DPR. Selain itu, BI menyampaikan rencana dan realisasi anggaran tahunan kepada Pemerintah dan DPR. Dalam hubungannya dengan BPK, BI wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BPK.

3. Tujuan Bank Indonesia

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah

4. Tugas Bank Indonesia

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan , maka tugas Bank Indonesia meliputi tiga hal

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

Dalam hal ini, Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Arah kebijakan didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Implementasi kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan suku bunga (BI Rate). Perkembangan indikator tersebut dikendalikan melalui piranti moneter tidak langsung, yaitu menggunakan operasi pasar terbuka, penentuan tingkat diskonto, dan penetapan cadangan wajib minimum bagi perbankan.

Pendekatan pengendalian moneter secara tidak langsung ini telah dilakukan sejak 1983 dengan mekanisme operasional yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan pasar uang di dalam negeri.

2. Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran

Sesuai dengan Undang- Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Di bidang sistem pembayaran Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran. Disisi lain dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem

pembayaran Bank Indonesia berwenang melaksanakan, memberi persetujuan dan perizinan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran seperti sistem transfer dana baik yang bersifat real time, sistem kliring maupun sistem pembayaran lainnya misalnya sistem pembayaran berbasis kartu.

Untuk mewujudkan suatu sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal, Bank Indonesia secara terus menerus melakukan pengembangan sesuai dengan acuan yang ditetapkan yaitu Blue Print Sistem Pembayaran Nasional. Pengembangan tersebut direalisasikan dalam bentuk kebijakan dan ketentuan yang diarahkan pada pengurangan risiko pembayaran antar bank dan peningkatan efisiensi pelayanan jasa sistem pembayaran.

Pada sistem pembayaran non tunai, saat ini penyediaan layanan jasa pembayaran sebagian besar dilakukan oleh perbankan baik melalui rekening bank di Bank Indonesia, hubungan bilateral antar bank maupun melalui jaringan internal bank yang dimilikinya. Layanan pembayaran dana antar nasabah tersebut biasanya dilakukan melalui transfer elektronik, sistem kliring maupun melalui sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS). Dari sisi piranti pembayaran, secara historis sistem pembayaran non tunai di Indonesia didominasi oleh piranti pembayaran berbasis warkat, namun dalam perkembangannya piranti elektronik mulai banyak berperan terutama sejak dioperasikannya sistem BI-RTGS pada bulan November untuk penyelesaian transaksi bernilai besar atau urgent.

Sementara itu dalam kaitannya dengan pengawasan sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki tanggung jawab agar masyarakat luas dapat memperoleh

jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat dan aman. Fungsi pengawasan sistem pembayaran ini selain berwenang untuk memberikan izin operasional terhadap pihak yang menyelenggarakan kegiatan di bidang sistem pembayaran juga berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran baik yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun pihak lain di luar Bank Indonesia.

Dengan menerapkan system pembayaran yang lancar dan aman merupakan salah satu prasyarat dalam keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan moneter. Sehubungan dengan hal tersebut Bank Indonesia mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran melalui system kewenangan dalam menetapkan penggunaan alat pembayaran dan mengatur penyelenggaraan jasa system pembayaran.

3. Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank

Tugas mengatur dan mengawasi bank merupakan salah satu tugas yang penting khususnya dalam rangka menciptakan system perbankan yang pada akhirnya dapat mendorong efektivitas kebijakan moneter. Perbankan selain menjalankan fungsi intermediasi, juga berfungsi sebagai media transmisi kebijakan moneter serta pelayan jasa system pembayaran. Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang penulis akan gunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada atau apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Law ini book) atau hukum yang dikonsepsiakan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah makassar. Melihat dari jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu metode penelitian hukum normatif yang kebanyakan membahas mengenai norma-norma hukum dan kepustakaan maka penelitian akan dilakukan pada:

- (1) Perpustakaan, Untuk menunjang teori-teori dan doktrin-doktrin yang akan penulis angkat maka diperlukan banyak referensi yang terdapat pada perpustakaan.
- (2) Bank Indonesia, sesuai dengan rumusan masalah yang penulis angkat. Maka penulis akan melakukan penelitian dengan cara wawancara pada Bank Indonesia.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.

- (1). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- (2). Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

- (3). Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia

- b. Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Sumber Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu sumber data lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari para penegak hukum yang menangani kasus ini dan masyarakat turut diresahkan akibat terjadinya tindak pidana ini.

- b. Sumber Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (interview), yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait ataupun yang menangani dengan tindak pidana ini, antara lain Hakim di pengadilan Negeri Makassar yang memutus perkara ini, serta pihak lain yang turut andil dalam terjadinya tindak pidana ini.
2. Teknik Kepustakaan, yaitu suatu teknik penelaahan normatif dari beberapa peraturan perundang-undangan dan berkasberkas putusan pengadilan yang terkait dengan tindak pidana ini serta penelaahan beberapa literatur yang relevan dengan materi yang dibahas.

E. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana penerapan hukum materill terhadap tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan di Indonesia

1. Kriminalisasi Pencucian Uang di Indonesia

Tindak Pidana Pencucian Uang/Money Laundering (selanjutnya dikatakan TPPU) merupakan kejahatan yang baru di Indonesia. Dikatakan demikian karena Indonesia baru mengkriminalisasikan dan menjadikannya Undang-Undang pertama kali pada tahun 2002.

TPPU sudah dikenal lama di dunia sejak 1930. Di Indonesia tppu bru dikatakan suatu kejahatan ketika di Undang-Undangkan nya UUTPPU tahun 2002. Di kriminalisasikannya suatu perbuatan yang awal nya bukan suatu kejahatan dikarenakan adanya perubahan norma dan nilai dalam suatu kelompok masyarakat. Namun berbeda dalam kasus kriminalisasi pencucian uang. Menurut **Yenti Garnasih**: “Indonesia melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang dikarenakan adanya dorongan dan ancaman dari pihak internasional salah satunya adalah FATF, sehingga Indonesia mengkriminalisasikan TPPU di Indonesia.”

TPPU dimaksudkan untuk memberantas tindak pidana dengan cara *follow the money*. Karena dengan cara itu dapat memutus aliran darah dalam suatu organisasi kriminal (*organization crime*). Para ahli juga menyebutkan bahwa TPPU memberantas tindak pidana pada “hilir”nya.

Paling sedikit ada 3 tujuan kriminalisasi pencucian uang. Pertama, pencucian uang merupakan masalah yang serius bagi dunia internasional, maka harus dilakukan kriminalisasi. Kedua, aturan anti pencucian uang dipandang sebagai cara yang paling efektif untuk mencari pemimpin organisasi kejahatan ekonomi (*leaders of organize criminal enterprise*). Ketiga, bahwa pelaku pencucian uang lebih mudah di tangkap dari pada menangkap pelaku kejahatan utamanya (*Predicate Offence*).³⁹

Berkaitan dengan alasan atau tujuan yang pertama bahwa pencucian uang menjadi permasalahan internasional yang paling tidak terdapat pada dua konferensi internasional. Pertama, *konfrence of money trail: International money laundering trends prevention/ control polish*, yang diselenggarakan di Coremayeur, Italia pada juni 1994. Pentengnya konferensi ini bagi tujuan kriminalisasi nampak dalam pernyataan⁴⁰:

“...This combination of difrent experience coming from governmental and reaserch field has ensure that this convrense in Coremayeour should become a milisten in the debate on anti-money loundering policies.”

Konferensi yang kedua adalah *United Nation Congres on The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*, 1995 di Cairo yang menyatakan bahwa ada tujuh belas jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan serius (*serious criemes*) dan diantara itu pencucian uang

³⁹ Sultzer, Money Laundering, Hal 145-146

⁴⁰ W.C.Gilmore, *Dirty Money-the evaluation of money laundering counter measures*, (Strassbourg:Counsile of Europe Press, 1995), hal 2.

menmpati urutan pertama.⁴¹ Masih berkaitan dengan tujuan yang pertama yaitu bahwa praktik pencucian uang pada umumnya menggunakan sarana lembaga keuangan maka kejahatan ini sangat membahayakan dan dapat merusak lembaga keuangan baik lembaga perbankan ataupun non perbankan.⁴² Selain itu lembaga-lembaga ini dimanfaatkan para pelaku pencucian uang, biasanya juga terjadi antar negara dan menggunakan teknik yang canggih.⁴³ Oleh karenanya salah satu tujuan kriminalisasi pencucian uang termasuk untuk melindungi keuangan internasional. Tujuan seperti ini juga nampak dalam *European Council / Council Directive 91/308*, tahun 1991 yang pada dasarnya untuk mencegah di gunakannya fasilitas perbankan dalam praktik pencucian uang.⁴⁴

Tujuan yang kedua yaitu, bahwa kriminalisasi merupakan cara yang paling efektif untuk menangkap pelaku atau pemimpinb kejahatan ekonomi terorganisasi. Ada dua bentuk kejahatan yang berbahaya yaitu kejahatan ekonomi dan kejahatan terorganisasi.⁴⁵ Penekanan pada kegiatan ekonomi sah yang di lakukan oleh kelompok kejahatan terorganisasi, misalnya seperti yang dilakukan di Australia melalui *poker macine and club industri, gaming machine concerns, unions, and waterfrond*.⁴⁶ Sedangkan di eropa bisnis

⁴¹ Gerhard O.W. Muller, former director of the UN Congres for Prevention of Crime and Treatment of Offenders, Statement at Workshop on “Global Struggle aggaints Organized Crime” at the 27th international Menejement Symposium, St. Gallen, Switzerland, (May 26-28, 1997)

⁴² Baldwin, “Wire Transfer.” hal 413.

⁴³ Barbot, “Money Laundering”, hal. 164-165.

⁴⁴ Smith, “Service Industry”, hal. 105.

⁴⁵ Harmon, “Money Laundering Law”, hal. 22.

⁴⁶ Chaikin, “Money Laundering”, hal. 474.

kelompok kejahatan terorganisasi pada umumnya dilakukan dalam kegiatan pasar uang.⁴⁷ Akibat buruk dari kegiatan tersebut tidak saja menyangkut kegiatan ekonomi dan lembaga keuangan itu sendiri tetapi juga menimbulkan bisnis yang tidak *fair*. Para pelaku pencucian uang ini pada umumnya tidak akan memperhatikan kewajiban pembayaran pajak atau kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan. Mereka hanya menikmati akses yang ada untuk mendapatkan keuntungan atau mengubah uang mereka menjadi sah.⁴⁸

Indonesia salah satu dari 16 negara yang dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang di dunia. Masuknya Indonesia dalam daftar hitam karena Indonesia terlambat mengkriminalisasikan pencucian uang. Faktor yang membuat Indonesia terlambat membuat UU TPPU menurut Yenti Garnasih ialah: “Karena Indonesia turut serta dalam menikmati hasil pencucian uang tersebut”. Indonesia masih butuh banyak uang untuk mendongkrang perekonomian sehingga tak perlu melihat sumber dana tersebut.

Menerima para pemodal asing untuk menginvestasikan harta mereka di Indonesia walaupun patut dicurigai harta yang menjadi modal investasi tersebut merupakan hasil dari suatu tindakan kejahatan, tetapi tetap saja diterima di Indonesia. Hal tersebutlah yang membuat moral para pejabat kita menjadi rusak.

⁴⁷ R. Bosworth Davies, “Euro-Fiannce: The Influence of Organized Crime”, makalah dalam The Eighth International Symposiom on Economic Crime, Cambridge, England, July 29-Aug 30, 1991, hal 3.

⁴⁸ Chaikin, “Money Laundering”, hal. 475.

Walaupun Indonesia telah meng-Undang-Undang kan TPPU di Indonesia pada tahun 2002. FATF belum melepaskan status daftar hitam (*black list*) dari Indonesia dengan alasan Indonesia belum menerapkan **40 + 9 Rekomendasi FATF**. Sehingga Indonesia belum dianggap secara serius dalam melawan TPPU di negaranya sendiri.

Namun berbeda dengan pandangan Bobby, salah seorang staf PPATK berpendapat: “Indonesia mengalami kerugian selama Indonesia belum membentuk UU TPPU karena adanya efek *Bubble priceing* selama maraknya pencucian uang di Indonesia”. *Bubble priceing* dimaksudkan ialah harga yang menggelembung dan merusak harga pasaran sehingga para pelaku usaha yang jujur akan kalah dengan para pelaku usaha yang membuat usahanya sebagai tempat pencucian uang. Lanjutnya: “jika pelaku pencucian uang menyimpan uang disuatu negara, hal itu tidak akan memberikan peningkatan ekonomi karena pelaku pencucian uang tersebut tidak bertujuan memberikan keuntungan kepada negara tersebut dan sewaktu-waktu dapat mengambil kembali uang yang disimpan tersebut.”

2. Perkembangan UU TPPU di Indonesia.

Setelah dikriminalisasikan TPPU di Indonesia, pemerintah bersama DPR “tancap gas” dalam upaya pemberantasan TPPU di Indonesia dengan mengUndang-Undangkan TPPU. Berikut perjalanan perkembangan UU TPPU di Indonesia:

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002

Sebagai negara yang baru meng-Undang-Undangkan TPPU tentu masih banyak celah dalam aturan ini. Walaupun telah diberikan arahan oleh FATF dalam membentuk UU TPPU seperti 40+9 Rekomendasi FATF tetapi Indonesia masih belum dapat menerapkan keseluruhan rekomendasi tersebut. Itu yang membuat Indonesia belum keluar dalam daftar hitam (*black list*) NCCTs (Non-Cooperative Countries and Territories).

Berikut hasil sidang rapat pleno FATF 18-21 Juni 2002 dan 24 Oktober 2002 hasil sidang rapat pleno FATF 9-11 Oktober 2002 FATF menegaskan terdapat 10 (sepuluh) hal yang harus diperhatikan oleh Indonesia untuk dapat membangun rezim anti pencucian yang efektif dan memenuhi international best practice, yaitu :

1. Belum adanya kerangka pengaturan yang komprehensif dalam kaitannya dengan standar anti pencucian uang untuk lembaga keuangan non-bank, seperti asuransi dan stockbrokers.
2. Belum adanya ketentuan tentang fit and proper test untuk lembaga keuangan non-bank.
3. Belum adanya ketentuan tentang know your customer untuk lembaga keuangan nonbank.
4. Perlunya memperluas pengertian transaksi keuangan yang mencurigakan dalam UU TPPU, sehingga termasuk kewajiban melaporkan transaksi yang diduga menggunakan dana hasil dari kejahatan.
5. Belum adanya ketentuan larangan pemberian informasi (“tipping off”) dalam UU TPPU.
6. Perlunya mempersingkat jangka waktu pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dari PJK kepada PPATK, karena 14 hari dinilai terlalu lama.
7. Perlunya

meniadakan batasan (threshold) hasil kejahatan (proceed of crime) yang dalam UU TPPU ditetapkan sebesar Rp 500 juta. 8. Adanya potensi untuk tidak dapat membekukan dan menyita hasil kejahatan yang besarnya dibawah batasan Rp 500 juta. 9. Belum adanya ketentuan yang mengatur bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance), dan 10. Belum beroperasinya PPATK sebagai FIU.⁴⁹

Walaupun belum memenuhi syarat untuk keluar dari daftar hitam (*black list*) NCCTs (Non-Cooperative Countries and Territories) Indonesia tetap mendapat apresiasi dari negara-negara yang tergabung dalam *Egmont Grup*. Karena usaha dan niat Indonesia dalam mencegah dan memberantas TPPU di Indonesia. Dalam UU tersebut lahirlah lembaga intelegen negara dalam bidang transaksi keuangan yaitu PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) atau dikenal secara international dngan sebutan FIU (Financial Intelligence Unit) Indonesia.

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003

Sebagai tindak lanjut (*follow up*) dari hasil sidang pleno FATF bahwa Indonesia masih masuk dalam daftar hitam (*black list*) NCCTs (*Non-Cooperative Countries and Territories*) dan perlu banyak perbaikan dalam UU no 15 tahun 2002 maka Indonesia memperbaharui dengan di Undang-Undangkan nya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan undang-undang tersebut pun akhirnya dapat diselesaikan oleh pemerintah RI dengan diundangkannya

⁴⁹https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/32_upaya-indonesia-keluar-dari-nccts_x.pdf

Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 13 Oktober 2003 (UU TPPU). Beberapa perubahan yang mendasar antara lain adalah: 1. penghapusan definisi hasil tindak pidana yang dikaitkan dengan jumlah uang sebesar Rp 500 juta; 2. perluasan tindak pidana asal dari 15 jenis menjadi 25 jenis, termasuk di dalamnya tindak pidana lainnya sepanjang ancaman pidananya 4 tahun atau lebih; 3. perluasan definisi transaksi keuangan mencurigakan, sehingga termasuk transaksi yang diduga menggunakan dana hasil dari kejahatan; 4. penambahan ketentuan anti-tipping off; 5. pengurangan masa pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dari 14 (empat belas) hari menjadi 3 (tiga) hari; 6. penambahan ketentuan mengenai bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*).⁵⁰

Selama melakukan on-site visit ke Indonesia, Tim Review FATF melakukan pertemuan dengan seluruh instansi teknis yang terkait dengan penanganan rezim anti pencucian uang di Indonesia, yaitu PPATK, Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, Departemen Hukum dan HAM, dan Departemen Luar Negeri. Tim FATF juga melakukan diskusi dengan beberapa PJK. Pertemuan-pertemuan tersebut dimaksudkan untuk menilai dan mengkonfirmasi kemajuankemajuan yang telah terjadi di Indonesia secara faktual sebagaimana telah disampaikan baik melalui tertulis maupun pertemuan

⁵⁰https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/32_upaya-indonesia-keluar-dari-nccts_x.pdf

bilateral sebelumnya. Berdasarkan on-site visit tersebut, Tim Review FATF menilai bahwa berbagai kemajuan berarti memang secara faktual terjadi di Indonesia. Perkembangan positif tersebut dicapai tidak saja dalam rangka menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang disampaikan oleh FATF sebelumnya namun juga untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi baik di domestik, regional maupun internasional. Selain itu, melalui surat tanggal 4 Februari 2005 Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Widodo A. S. atas nama Pemerintah menyampaikan komitmen pemerintah RI untuk terus melakukan pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia. Hasil on-site visit tersebut untuk selanjutnya dibahas pada sidang pleno FATF yang diselenggarakan di Paris pada tanggal 9-11 Februari 2005. Menimbang adanya perkembangan yang memadai dan berkelanjutan serta adanya komitmen yang kuat dari pemerintah Indonesia dalam membangun rezim anti pencucian uang, melalui surat tanggal 11 Februari 2005 akhirnya FATF memutuskan untuk mengeluarkan Indonesia dari daftar NCCTs. Sesuai dengan kebijakan FATF yang berlaku dalam proses pencabutan suatu negara dari daftar NCCTs (*delisting procedure*), FATF akan melakukan pemantauan (*monitoring*) yang pelaksanaannya akan dikoordinasikan dengan Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) sebagai *FATF-style regional body*. Dalam fase monitoring ini, Indonesia diwajibkan menyampaikan laporan perkembangan penerapan rezim anti pencucian uang secara regular. Disamping itu, dalam fase monitoring ini juga akan dilakukan pertemuan bilateral dengan Tim Review FATF.

c. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010

Setelah tanggal 11 Februari 2005 Indonesia secara sah telah keluar dari daftar hitam (*black list*) NCCTs dan berkomitmen untuk terus melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia. Walaupun sudah tidak masuk dalam daftar hitam Indonesia tetap memperbaharui UU TPPU dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia serius dalam menangani TPPU di Indonesia.

Tetapi tetap saja masih ada beberapa kekurangan yang nampak dalam UUTPPU terbaru ini. Menurut Yenti Garnasih masih ada kekurangan pada pihak pelapor karena hanya sebagian kecil yang diberi kewajiban dalam melakukan pelaporan sedangkan cakupan pencucian uang sangat besar. Beliau mengatakan bahwa perlu ditambahkan sebagai pihak pelapor seperti profesi akuntan publik, notaris, pengacara dll. Beliau juga kurang setuju pada pasal 69 mengenai penuntutan *in absentia* bahwa maksud dari TPPU itu sebagai wadah untuk memberantas tindak pidana asal (*predicate crime*) bukan hanya sekedar memberantas TPPU. Terdapat celah juga pada pasal 71-74 mengenai penetapan penuntut pada kasus TPPU karena dapat menimbulkan multi tafsir terhadap siapa yang akan menjadi penuntut terhadap kasus TPPU sesuai dengan pidana asalnya.

Walaupun terdapat beberapa celah dalam UU TPPU menurut Bobby: “UU anti pencucian uang Indonesia merupakan salah satu UU paling progresif di dunia internasional.”

3. PPATK/ FIU (*Financial Intelegant Unit*) Indonesia.

Setelah hadirnya UU TPPU di Indonesia, menjadi suatu hal yang wajib untuk dijalankan untuk membentuk FIU (*Financial Intelegant Unit*) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU di suatu negara. Hal tersebut juga tertera dalam 40 *Recomendation FATF*.

UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 secara tegas mengamanatkan pendirian PPATK sebagai lembaga sentral (*focal point*) yang mengkoordinasikan pelaksanaan UU TPPU. PPATK diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2003 oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, dan mulai saat itu telah beroperasi secara penuh.

Sebelum PPATK beroperasi secara penuh tersebut, tugas menerima laporan dari industry perbankan dilakukan oleh Unit Khusus Investigasi Perbankan, Bank Indonesia

Berbagai upaya dilakukan untuk menunjang operasionalisasi PPATK, antara lain dengan dikeluarkannya Keppres No.81 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PPATK, Keppres No.82 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kewenangan PPATK, Keppres No.3 Tahun 2004 tentang Sistem Kepegawaian PPATK

Rancangan Keppres Tentang Sistem Penggajian dan Renumerasi PPATK hingga saat ini belum disahkan. Saat ini PPATK dipimpin oleh seorang Kepala dan 4 (empat) orang Wakil Kepala yang diangkat

berdasarkan Keputusan Presiden dan diambil sumpahnya di hadapan Ketua Mahkamah Agung. Untuk kelancaran operasionalisasi PPATK, Pemerintah RI menyediakan anggaran melalui mekanisme APBN.

Untuk melengkapi ketentuan yang telah dikeluarkan oleh otoritas pengawas PJK, khususnya yang terkait dengan penerapan KYC, PPATK juga mengeluarkan 6 (enam) pedoman yang dimaksudkan untuk memudahkan PJK dalam melakukan kewajiban pelaporan kepada PPATK dalam bentuk Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT).

Sejak beroperasi penuh pada tanggal 17 Oktober 2003, PPATK telah dapat menerima LTKM secara langsung dari PJK. Penyampaian LTKM oleh PJK dapat dilakukan baik secara manual maupun on-line. Jumlah LTKM yang diterima oleh PPATK menunjukkan tendensi yang meningkat, demikian pula halnya dengan jumlah PJK yang telah menyampaikan laporan. Dalam kurun waktu 29 bulan sebelum beroperasinya PPATK secara penuh pada 17 Oktober 2003, terdapat 291 LTKM yang telah diterima melalui Bank Indonesia.

Sementara itu per posisi 17 Juni 2005, jumlah PJK yang menyampaikan LTKM tercatat sebanyak 90 bank umum, 1 BPR dan 16 lembaga keuangan nonbank (perusahaan asuransi, sekuritas, pedagang valuta asing, lembaga pembiayaan dan dana pensiun) dengan total 2159 LTKM.

Sementara itu untuk LTKT, PPATK hingga tanggal yang sama telah menerima 1.252.689 LTKT dari 107 bank umum, 18 PVA, 7 BPR dan 1 perusahaan asuransi. Penyampaian LTKM dan LTKT dilakukan secara manual maupun on-line.

Untuk kelancaran jalannya operasional PPATK dan memudahkan PJK dalam memenuhi kewajiban pelaporannya, telah dikembangkan system pelaporan yang disebut dengan TRACeS (*Transaction Report Acquisition Electronic System*) sejak tahun 2003. TRACeS merupakan system informasi pelaporan yang dapat dilakukan oleh PJK secara on-line. Sementara itu, guna menunjang tugas analisis, saat ini PPATK telah memiliki analytical tools dan data warehouse yang akan terus dikembangkan di kemudian hari.

a. Hubungan kerja sama FIU Indonesia dengan FIU negara lain.

TPPU merupakan kejahatan transnasional yang memiliki jaringan kejahatan yang sangat luas dan meliputi berbagai organisasi kejahatan (*organize crime*) di dunia. Maka dari itu dalam usaha untuk melawan TPPU tingkat internasional diharuskan adanya kerjasama transnasional dalam mengungkap kejahatan tersebut. Kerjasama yang diwakili FIU tiap negara merupakan solusi sebagai sarana pertukaran informasi dan data yang diperlukan dalam rangka menungkap kasus TPPU transnasional.

Maka dari itu adanya forum internasional "*Egmon Group*" dapat menjadi wadah untuk saling mempererat hubungan multilateral antar negara dalam rangka pemberantasan TPPU.

Menurut Bobby: “Hubungan antar FIU seluruh dunia sangat erat hubungannya, walaupun hubungan diplomatis suatu negara kurang harmonis hal tersebut tidak mempengaruhi hubungan FIU anatar negara tersebut. Seperti “TTM” walau tidak memiliki hubungan diplomatis tetapi dalam pertukaran data & informasi FIU antar negara saling membantu.”

Dalam menjalin hubungan antar FIU menerapkan **asas resiprositas** yaitu asas timbal balik antar negara dalam menjalin hubungan. Jika salah satu FIU telah dibantu maka FIU yang dibantu tersebut wajib membantu FIU yang telah membatunya kelak. Sehingga menjalin hubungan yang pamrih.

4. Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam Transaksi Perbankan.

TPPU merupakan tindak pidana yang memiliki cakupan yang luas, cakupan TPPU dapat dilihat pada UUTPPU pasal 2 ayat (1). Salah satu wadah tempat pencucian uang yang terdapat pada pasal tersebut ialah perbankan.

Perbankan merupakan wadah yang cukup digemari para pelaku pencucian uang di tanah air. Hal tersebut dapat dilihat dari statistik PPATK bahwa dilihat dari sisi jumlah pelapor, Selama Januari 2015 s.d. April 2015 tercatat sebanyak 211 PJK telah menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan (selajutnya dikatan LTKM) kepada PPATK. Sebagian besar LTKM atau sebanyak 56,9 persen disampaikan oleh PJK Non Bank,

sedangkan 43,1 persen selebihnya disampaikan oleh PJK Bank, Mayoritas TKM selama priode ini terjadi di Jakarta (45,0 persen), dan Jawa Timur (11,5 persen).⁵¹

Setelah melihat statistik PPATK bahwa sarana perbankan menjadi wadah favorit untuk dijadikan tempat pencucian uang dibandingkan dengan PJK (Penyedia Jasa Keuangan) lainnya di Indonesia. Dikarenakan perbankan lebih mudah untuk menyimpan uang hasil kejahatan.

Menurut Bobby: “Perbankan menjadi sarana favorit untuk menjadi tempat pencucian uang dikarenakan perbankan merupakan sarana yang paling gampang untuk dijangkau dan paling mudah bagi kebanyak pelaku kejahatan.”

Dalam menggunakan metode pencucian uang mayoritas di Indonesia masih menggunakan cara yang klasik seperti langsung menyimpan di bank. Metode klasik yang dimaksud hanya sampai pada tahapan *layering*. Karena pencucian uang masih baru di Indoensia maka metode pencucian uang belum terlalu berkembang. Walaupun ada sebagian kecil telah menggunakan cara-cara yang canggih.

⁵¹<http://www.ppatk.go.id/pages/detail/105/11622>

5. Study Kasus 447/Pid.B/2008/PN. Krw

a. Identitas Terdakwa

Nama : RADEN HANDARU ISMOYOJATI
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/28 April 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tebet Timur III D/18 RT.03/07, Tebet Timur,
Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS Departemen Keuangan

b. Posisi Kasus

Pertama ;

Bahwa ia Terdakwa Raden Handaru Ismoyojati pada sekitar bulan Juni 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Juni 2007 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2007, bertempat dari Bank BNI Cabang Karawang, atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri

maupun atas nama pihak lain, perbuatan perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Raden Handaru Ismoyojati pada pertengahan tahun 2006 sampai dengan Pebruari 2007 mendapat tugas bersama dengan kedua rekannya yaitu sdr. Yudi Hermawan dan Agi Sugiono (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) sebagai anggota tim dari kantor wilaya DJP Jakarta Jakarta Khusus beralamat di Gedung Sucofindo Nomor 34 Jakarta Selatan, telah melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak (WP) PT. Broadband Multi Media Tbk.;

Bahwa setelah berakhir pemeriksaan pajak terhadap WP sekitar bulan April 2007 Sdr. Yudi Hermawan menemui terdakwa Raden Handaru Ismoyojati dan menceritakan ada dana dari Pak Asri Harahap selaku Konsultan Pajak dari PT. Broadband Multi Media Tbk, sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan menawarkan pembagiannya, dimana Sdr Yudi Hermawan di BNI Cabang karawang nomor rek. 119609509 yang pertama sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kedua melalui transfer juga sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Nomor: 0700004219288 rekeningmilik terdakwa Raden Handaru Ismoyojati dan uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya;

Bahwa Terdakwa Raden Handaru Ismoyojati mengetahui juga bahwa Sdr. Agi Sugiono,SE. diberi bagian uang oleh Sdr. Yudi Hermawan yang berasal dari pemeriksaan WP (PT. Broadband Multi Media Tbk) sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dan terdakwa menerima atau

menguasai penempatan melalui pentransferan, sebagai pembayaran, hibah, sumbangan penitipan, pertukaran harta kekayaan dari hasil pemeriksaan wajib pajak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Kedua ;

Bahwa ia terdakwa Raden Handaru Ismoyojati pada sekitar bulan Juni 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan juni 2007 atau setidaknya masih dalam tahun 2007, bertempat dari Bank BNI Cabang Karawang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, “menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, sumbangan, penitipan, penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Raden Handaru Ismoyojati pada pertengahan tahun 2006 sampai dengan pebruari 2007 mendapat tugas bersama dengan kedua rekannya yaitu Sdr. Yudi Hermawan dan Agi Sugiono (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) sebagai tim dari Kantor Wilayah DPJ Jakarta Khusus beralamat di Gedung Sucofindo Nomor 34 Jakarta Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak (WP) PT. Broadband Multi Media Tbk;

Bahwa setelah berakhir pemeriksaan pajak terhadap WP terhadap bulan April 2007 Sdr. Yudi Hermawan menemui Terdakwa Raden Handaru Ismoyojati dan menceritakan bahwa ada dana dari Pak Asri Harahap selaku konsultan pajak dari PT. Broadband Multi Media Tbk sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan menawarkan pembagian dimana Sdr. Yudi Hermawan member uang kepada terdakwa Raden Handaru Ismoyojati melalui transfer dari rekening Sdr. Yudi Hermawan di BNI Cabang Karawang Nomor Rek.119609509 yang pertama sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kedua melalui transfer sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta) yang ditransfer ke rekening Nomor :0700004219288 rekening milik terdakwa Raden Handaru Ismoyojati dan uang tersebut telah digunakan untuk keperluan pribadinya;

Bahwa Terdakwa Raden Handaru Ismoyojati mengetahui juga bahwa Sdr. Agi Sugiono,SE. diberi bagian uang oleh oleh Sdr. Yudi Hermawan yang berasal dari pemeriksaan Wp (PT. Broadband Multi Media Tbk) sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dan terdakwa menerima dan menguasai penempatan melalui pentransferan, sebagai pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran harta kekayaan dari hasil pemeriksaan wajib pajak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 6 ayat (1) huruf a,b,c,d,e, dan f Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

c. Komentar Penulis

Surat dakwaan atau tuduhan adalah surat atau akta yang memuat suatu perumusan tindak pidana yang di tuduhkan (didakwakan), yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan, yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup bukti terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Menurut Pasal 143 KUHAP, bahwa surat dakwaan mempunyai dua syarat yang harus dipenuhi, ialah⁵²:

a. Syarat-syarat formill

Syarat formill surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat

(2) huruf a KUHAP, yang mencakup:

1. Diberi tanggal
2. Memuat identitas terdakwa secara lengkap
 - a. Nama lengkap;
 - b. Tempat,umur/tanggal lahir;
 - c. Jenis kelamin;
 - d. Kebangsaan
 - e. Tempat tinggal;
 - f. Agama,dan
 - g. Pekerjaan
3. Ditandatangani penuntut umum

⁵² Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Syarat-syarat Materil

Syarat materil menurut pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*).

Adapun jenis-jenis dakwaan dibagi menjadi 5 (lima) yaitu:

1. Dakwaan Tunggal, yaitu hanya satu jenis tindak pidana saja yang didakwakan kepada terdakwa, yakni melanggar ketentuan pasal tersebut.
2. Dakwaan Alternatif, yaitu ada banyak dakwaan tetapi hanya satu yang harus dibuktikan tergantung dari hasil persidangan.
3. Dakwaan Kumulatif, yaitu banyak dakwaan atau banyak pelanggaran (banyak pasal)
4. Dakwaan subsidaritas (bersusun), dakwaan yang bersusun yaitu dakwaan primer (yang harus didakwakan lebih dahulu atau dari segi ancaman pidana) dan dakwaan subsidair. Perkara yang tidak dapat dilaksanakan dua kali berdasarkan fakta-fakta dipersidangan atau beberapa tindakan.
5. Dakwaan Gabungan (kombinasi) dari dakwaan kumulatif, dakwaan alternative dan subsidaritas.

Dalam dakwaan pada surat dakwaan dengan nomor register 447/Pid.B/2008/PN.Krw menggunakan jenis **Dakwaan Tunggal**. Dikatakan demikian karena dalam surat dakwaan tersebut penuntut umum hanya memberikan 1 (satu) dakwaan saja kepada terdakwa Raden Handaru Ismoyojati.

Dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, pada pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, dan f.

Dalam perkara ini tempat kejadian (*locus delicti*) terletak pada wilayah hukum **Pengadilan Negeri Karawang** lebih tepatnya pada kantor Bank BNI Karawang. Maka dari itu kasus ini ditangani oleh Pengadilan Negeri Karawang. Hal tersebut telah tertera pada syarat materil menurut pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP. Sedangkan waktu kejadian (*tempus delicti*) pada pertengahan tahun 2006 sampai dengan Februari 2007. Sehingga mengena pada UUTPPU tahun 2003, sebelum adanya perubahan pada Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pelaku Pencucian Uang dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu;

1. Pelaku Pencucian Uang Aktif, yaitu pelaku yang menjadi actor utama atau yang melakukan tindak pidana asal dan melakukan tindak pidana pencucian uang.
2. Pelaku Pencucian Uang Pasif, yaitu pelaku yang hanya sebagai actor pembantu dalam terlaksananya pencucian uang atau yang menjadi wadah untuk mengaburkan asal uang yang patut diduga dari tindak pidana.

Dalam kasus ini terdakwa menjadi **pelaku pasif** karena hanya menerima uang yang diberikan oleh rekannya Yudi Hermawan yang berasal dari

konsultan pajak PT. Broadband Multi Media Tbk. Sehingga terdakwa didakwa oleh penuntut umum pada pasal 6 ayat (1) yang berbunyi;

Pasal 6

“(1)Setiap orang yang menerima dan menguasai:

- a. Penempatan;
- b. Pentransferan;
- c. Pembayaran;
- d. Hibah;
- e. Sumbangan;
- f. Penitipan; atau
- g. Penukaran;

Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”⁵³

Dalam melakukan tindak pidana pencucian uang secara umum dikenal terdapat 3 (tiga) tahap pencucian uang yaitu (1)Penempatan (*Placement*), (2)Pelapisan (*Layering*) (3)Penggunaan (*Integration*). Tapi tidak menutup kemungkinan tiap tahap tersebut dapat berdiri sendiri/mandiri. Jika dikaitkan dengan kasus ini terdakwa melakukan pencucian uang hanya sampai pada tahap pertama yaitu Penempatan (*Layering*) hal itu dapat dilihat pada transfer yang

⁵³ Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003

dilakukan rekan terdakwa kepada terdakwa dengan melakukan transfer uang yang berasal dari tindak pidana.

Dengan membaca dan menganalisa posis, dakwaan, dan tuntutan kasus ini. Saya sebagai penulis bahwa terdakwa Raden Handaru Ismoyojati telah memenuhi unsur untuk dikatakan sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai dengan aturan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

B. Bagaimana peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam transaksi perbankan.

Bank adalah lembaga kepercayaan masyarakat yang memiliki kedudukan dan peranan penting dalam sistem perekonomian suatu negara, sehingga bank sering disebut sebagai jantung dari sistem keuangan. Keberadaan aset bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat perlu selalu dijaga mengingat kepercayaan masyarakat sangat dibutuhkan bank untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dan fungsi bank serta mencegah terjadinya *bank runs and panics*. Oleh sebab itulah industri perbankan paling banyak diatur dan senantiasa diawasi secara ketat oleh Bank Indonesia.

Namun seiring perkembangan zaman membuat dunia perbankan menjadi semakin kompleks dan rumit. Hal tersebut yang memicu dan membuka peluang terjadinya kecurangan maupun kejahatan dibidang perbankan. Beberapa kecurangan dan kejahatan dibidang perbankan seperti kasus bank Century, Kasus BLBI dsb dianggap bahwa tidak mampunya BI untuk melakukan pengawasan terhadap kecurangan dan kejahatan dibidang perbankan. Sehingga pemerintah berinisiatif untuk membuat lembaga yang bersifat independen yang melakukan pengawasan tidak hanya pada bidang perbankan melainkan terhadap seluruh yang bergerak pada bidang jasa keuangan. Inisiatif pemerintah tersebut direalisasikan dengan diUndang-Undangkannya UU Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK.

Dengan melihat hadirnya OJK nantinya, dapat dimaksudkan untuk menghilangkan penyalahgunaan kewenangan(*abuse of power*) yang selama ini cenderung muncul. Sebab dalam OJK, fungsi pengawasan dan pengaturan dibuat

terpisah. Akan tetapi meskipun OJK memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan dalam satu tubuh, fungsinya tidak akan tumpang tindih, sebab OJK secara organisatorisakan terdiri dari tujuh dewan komisioner. Ketua dewan komisioner akan membawakan tiga anggota komisioner yang masing-masing mewakili perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan non bank (LKNB). Kewenangna pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia akan dikurangi, namun Bank Indonesia masih mendampingi pengawasan. Kalau selama ini mikro dan makro prudensialnya di Bank Indoensia, nanti OJK akan fokus menangani mikro prudensialnya.

Namun secara teknis pembentukan OJK di Indonesia yang dijelaskan oleh bapak **Sabarudin** selaku *Deputi Direktur* OJK sebagai berikut:

1. Semakin banyaknya konglomerasi keuangan
2. Kompleksitas keuangan
3. Kompleksitas produk
4. Pengawasan terintegrasi
5. Independensi

Jika mengkaji mengenai peranan OJK terhadap tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan. Hal pertama yang diperhatikan ialah Undang-Undang yang mengatur. Dalam hal ini undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut dapat dilihat pada UU Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK. Dalam Undang-Undang ini tertera jelas mengenai peranan dan fungsi OJK. Untuk membahas peranan dan fungsi terdapat pada pasal 7 dan 8, yang berbunyi:

Pasal 6

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sector Perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sector Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sector Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sector perbankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi;
 1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumberdaya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktifitas di bidang jasa
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 1. Likuidasi, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio peminjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;

- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 - 1. Menejemen resiko;
 - 2. Tata kelola bank;
 - 3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang;
 - 4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
- d. Pemeriksaan bank.⁵⁴

Jika kita melihat pada **pasal 6** sudah tertera jelas bahwa tugas OJK sebagai pengawas dan pengatur pada sector jasa keuangan. Jasa keuangan yang dimaksud adalah bank dan non-bank.

Dalam pasal 8 dijelaskan pula mengenai prinsip mengenal nasabah yang merupakan hasil adopsi dari BI yang diambil alih oleh OJK. Prinsip mengenal nasabah/ KYC merupakan salah satu bentuk nyata fungsi pengaturan yang dimiliki oleh OJK. Prinsip mengenal nasabah juga merupakan tindakan pencegahan (*preventive*) terhadap kejahatan dibidang perbankan terlebih pada pencucian uang. OJK mewajibkan kepada seluruh sector jasa keuangan perbankan menrepakan prinsip tersebut kepada seluruh nasabahnya dengan harapan dapat mengurangi kejahatan dibidang perbankan. Prinsip Mengenal nasabah di Indonesia lahir sekitar tanggal 18 Juni 2002, saat Bank Indonesia mengeluarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang prinsip mengenal nasabah (*Know Your Costumer Principles*). Latar belakang bank Indoensia

⁵⁴ UU no.21 tahun 2011 tentang OJK

mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut adalah karena semakin berkembangnya kegiatan usaha perbankan sehingga bank dihadapkan pada berbagai resiko, baik resiko operasional, hukum, terkonsentrasinya transaksi maupun resiko reputasi.

OJK dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang merasa perlu untuk melakukan kerjasama dengan lembaga yang bergerak dibidang yang sama yaitu PPATK dan BI. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bekerjasama membuat strategi dan kebijakan bersama serta langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.⁵⁵ Kerja sama dilakukan agar tidak ada timpang tindih dalam melaksanakan tugas dan wewenang setiap lembaga dan untuk saling mempermudah dalam menjalankan tugas masing-masing. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak **Sabarudin** bahwa “perbedaan mendasar pada penanganan TPPU oleh OJK dan PPATK terdapat pada objek penanganannya, objek OJK adalah institusinya sedangkan PPATK adalah pada nasabahnya.”

⁵⁵ <http://kriminalitas.com/ojk-bi-dan-ppatk-memerangi-kejahatan-pencucian-uang-3/>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Perbankan merupakan suatu tindak pidana yang cukup kompleks. Cukup kompleks yang dimaksudkan oleh penulis ialah banyak aspek yang diperhatikan dalam melakukan kriminalisasi di Indonesia. Perlu diperhatikan aspek historis yang panjang sebelum melakukan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang. Walaupun ada juga peranan pihak internasional sehingga Indonesia melakukan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang.

Setelah Indonesia menjadikan tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan diperlukan usaha lebih keras untuk menegakkan hukum tersebut. Ditinjau melalui teori Lawrence M. Friedman mengenai Tri Elemen Of Legal System. Bahwa harus memperhatikan tiga elemen hukum yaitu: Substansi, Subjek, dan Kultur. Ketiga elemen tersebut telah diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dalam mengakkan hukum di Indonesia dan di terapkan pada Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam studi kasus nomor 447/Pid.B/PN.Krw. bahwa hakim telah memutuskan secara sah bahwa terdakwa bersalah. Dan penulis berpendapat bahwa hakim telah mengabil keputusan yang benar sesuai hukum yang berlaku ditinjau dari segi hukum materil maupun formil.

2. Dalam meninjau dan menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap tindak pidana pencucian uang. Penulis berpendapat bahwa BI melakukan peran yang cukup penting dalam melakukan pencegahan (*preventif*) Tindak Pidana Pencucian Uang dalam transaksi Perbankan. Peran yang cukup penting itu dapat dilihat mulai dari dibentuknya Unit Kerja Khusus sebelum efektifnya PPATK dalam melakukan pengawasan TPPU di Indonesia hingga dikeluarkannya peraturan OJK mengenai system KYC (*Knowing Your Costumer*) dan mewajibkan setiap PJK Bank untuk menerapkan system tersebut sebagai upaya pencegahan TPPU di bidang Perbankan.

B. Saran

1. Dalam melakukan penegakan hukum materill dibidang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Perbankan perlu adanya peran berbagai pihak. Seperti teori Lawrance M. Friedman tentang *Three Element of Legal System* bahwa perlu adanya peran Substansi, Subyek, Kultur hukum agar dapat ditegakkannya suatu hukum.
2. Seperti yang dikatakan Dr. Yenti Garnasih,S.H, M.H dalam UUTPPU yang terbaru masih memiliki banyak celah sehingga banyak pelaku TPPU dapat lolos dari jeratan hukum. Maka diperlukan pembaharuan UUTPPU yang lebih konkrit.
3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib mengawasi PJK Bank dalam melakukan usaha dan menghindari adanya TPPU yang marak terjadi di

pihak perbankan yang dapat merusak nilai tukar rupiah. Salahsatu upaya pihak BI dalam mencegah TPPU ialah dengan mengeluarkan aturan KYC yang harus diterapkan kepada setiap PJK Bank. Walaupun telah menerapkan aturan tersebut masih banyak terjadi TPPU dibidang perbankan maka dari itu perlu pengawasan yang lebih ketat dan sanksi yang memeberi efek jera kepada para pelaku dan yang turut serta membantu pelaku TPPU.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT. CITRA ADITYA BAKTI
- Adrian Sutedi. 2007. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: SINAR GRAFIKA
- Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Aiwarman. 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Amin Widjaja Tunggal. 2014. *Pencegahan Pencucian Uang (Money Laundering Prevention)*. Jakarta: HARVARINDO.
- Arief Amrullah. 2004. *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*. Malang: Bayumedia.
- N.H.T. Siahaan. 2008. *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*. Jakarta: JALA
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: KENCANA
- Romli Atmasasmita. 2014. *Hukum Kejahatan Bisnis*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno. 1983. *AZAS-AZAS HUKUM PIDANA*. Jakarta: BINA AKSARA
- Andi Hamzah. 1996. *HUKUM PIDANA EKONOMI*. Jakarta: Erlangga
- Sentosa Sembiring. 2012. *HUKUM PERBANKAN EDISI REVISI*. Bandung: Mandar Maju.

B. Makalah

Muhammad Nurul Huda. Makalah: Azas Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Globalisasi Hukum.

Yunus Husein. Makalah: UPAYA MEMBERANTAS PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*)

Yunus Husein. Makalah: KEBIJAKSANAAN BANK INDONESIA TENTANG PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*)

Yunus Husein. Makalah: PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA.

Yunus Husein. Makalah: IMPLEMENTASI UU NO. 15 TAHUN 2002 DAN KAITANNYA DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA.

Yunus Husein. Makalah: KEGIATAN PEMUTIHAN UANG (*MONEY LAUNDERING*).

C. Internet

<http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/status/Contents/Default.aspx>

www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/misi-visi/Contents/Default.aspx

D. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana